

**IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN
DESA SEBERANG TALUK MENJADI KAWASAN
AGROPOLITAN DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu
Program Studi Ilmu Administrasi Negara*



**Oleh
MONICA VIVILANDA
NIM 160411071**

**ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DESA
SEBERANG TALUK MENJADI KAWASAN
AGROPOLITAN DI KECAMATAN KUANTAN
TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NAMA : MONICA VIVILANDA

NPM : 160411071

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS : ILMU SOSIAL

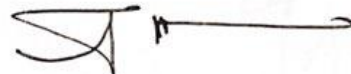
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pembimbing I Pembimbing II




DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302



SAHRI MUHARRAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi



DESRIADI, S.Sos., M.Si

NIDN. 1022018302

PENGESAHAN

Diperiksa dan Disahkan Oleh Panitia Ujian Proposal Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 10
Bulan : Juni
Tahun : 2020

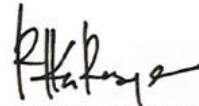
Tim Penguji

Ketua



ZUL AMMAR, SE, ME
NIDN. 1020088401

Sekretaris



RIKA RAMADHANTI, S.IP, M.Si
NIDN. 1030058402

1. **DESRIADI, S.Sos, M.Si** (Pembimbing I)
2. **SAHRI MUHARRAM, S.Sos, M.Si** (Pembimbing II)
3. **EMILIA EMHARIS, S.Sos, M.Si** (Anggota)
4. **ALSAR ANDRI, S.Sos, M.Si** (Anggota)

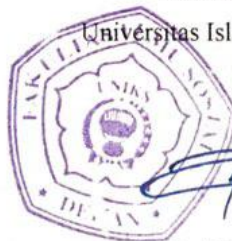
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Dekan



ZUL AMMAR, SE, ME
NIDN. 1020088401

TANDA ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Monica Vivilanda
NPM : 160411071
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Administrasi Negara
Universitas : Islam Kuantan Singingi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :
Implementasi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 18 Maret 2020
Yang Membuat Pernyataan



MONICA VIVILANDA
NPM. 160411071

“MOTTO”

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya....”
(QS. Al Baqarah:286)**

**“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap..”
(QS. Al-Insyirah:7-8)**

**“Ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu”
-Norman Vincent Peale-**

KATA PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk seluruh kasih sayang yang selalu menjadi kekuatan dan semangat terbesarku, hanya terima kasih dan syukur yang dapat kuucapkan :

Ayahandaku **ROFIS UMRA**

Ibundaku **NELIATI S.Pd**

Kedua orang tuaku yang paling berharga dalam hidup saya, hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada kita sendiri. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terimakasih karena selalu ada untukku.

Kepada Abangku:

VICTOR RONANDES S.E

ANGGA RONANDA

Kepada Yang Tersayang:

DWI EKA PUTRA ANDRIYAN, S.H

Saudara-Saudaraku dan Keluarga Besarku

Bapak dan Ibu Dosen.

Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dan teman-teman seperjuangan Administrasi Negara 2016.

Kata persembahan ini kubuat dengan sepenuh hati.

Terimakasih banyak atas segala *support* yang telah kalian berikan.

By. Monica Vivilanda

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DESA SEBERANG TALUK MENJADI KAWASAN AGROPOLITAN DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**MONICA VIVILANDA
NPM. 160411071**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembangunan desa Seberang Taluk menjadi kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pembangunan desa Seberang Taluk menjadi kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, angket dan observasi dengan pertayaaan yang telah disusun. Informan yang diambil pada penelitian ini 23 orang. Penelitian menggunakan teknik analisis data Deskriptif-Kualitatif yaitu menganalisis data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dihubungkan dengan teori yang menunjang pembahasan, sehingga dapat diambil kesimpulan. Variable dalam penelitian ini terdiri dari 1 variabel yaitu Implementasi yang terdiridari 6 indikator yaitu: organisasi,interpretasi, aplikasi, komunikasi, sumberdaya,dan disposisi. Populasi dan sampel penelitian ini adalah aparatur desa berjumlah 3 orang dan masyarakat (petani) berjumlah 20 orang jumlah keseluruhannya 23 orang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitaif. Hasil penelitian pembangunan desa menjadi kawasan agropolitan di kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah Tidak terimplementasi.

Kata kunci : Implementasi, Pembangunan Desa, Agropolitan.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTION OF DEVELOPMENT OF SEBERANG TALUK VILLAGE TO BE AGROPOLITAN AREA IN KUANTAN TENGAH DISTRICT KUANTAN SINGINGI REGENCY

**MONICA VIVILANDA
NPM.160411071**

This research aims to investigate the development of Seberang Taluk Village to be Agropolitan area in Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The question of this research was how to develop implementation in Seberang Taluk Village being Agropolitan area in Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. Moreover, the data collection method of this research was interview and questionnaire. There are 23 people have chosen to be respondents in this research. The analysis technique in this research used descriptive qualitative was analyzed the data based on the fact then connected with the theory. The variable in this research used 1 variable was implementation which consist of 6 indicators. The 6 indicators were organization, interpretation, application, communication, resources, disposition. The population and sample in this research were 3 apparatus of the village and 20 were farmer in Seberang Taluk Village. This research used quantitative and qualitative as the method. Therefore, the result of the development of implementation in Seberang Taluk Village to be Agropolitan area in Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency has no implementation.

Keywords : Implementation, Development of Village, Agropolitan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Yang telah melimpahkan rahmat dan HidayahNya, karena atas berkat limpahan rahmat,taufik,dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “Implementasi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi” tepat pada waktunya.

Sholawat beriring salam selalu tercurah kepada sosok yang telah membawa umat manusia dia alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan yakni Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, semoga dengan banyak mengucapkan sholawat akan mendapatkan safaatnya di akhirat kelak.

Penulisan proposal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial (UNIKS). Keberhasilan penyusunan proposal ini terselesaikan berkat bimbingan, pengarahan, sumbangan, pemikiran, saran dan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Ir.Hj.Elfi Indrawanis,MM Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi,
2. Bapak Zul Ammar,SE.,ME Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi,
3. Bapak Desriadi,S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus dosen pembimbing,
4. Bapak Sahri Muharram,S.Sos.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan Staf Tata Usaha yang telah memberikan pelayanan selama kuliah di Fakultas Ilmu Sosial.

6. Keluargaku yang paling terbaik yang pernah ku miliki, terutama Ayahanda tersayang (Rofis Umra), Ibunda tercinta (Neliati S.Pd) yang selalu memberikan doa, cinta dan kasih sayang serta motivasi . Abang-abangku yang aku sayangi (Victor Ronande,SE dan Angga Roranda) yang tidak pernah bosan memberikan support, pengertian dan perhatian baik moril maupun materil.
7. Sahabat-sahabat yang tercinta menjadi *good listener* atas keluhan kesah yang penulis hadapi : Gustri Mayasari, S.Sos,Rima Fitri Agustina,SM,Verra Angela dan Rinda Modi Agustri. Serta yang terkhusus Pacarku yang tercinta Dwi Eka Putra Andriyan,Terima kasih atas doa dan motivasinya selama ini. Terimakasih telah setia menemani dikala suka maupun duka.
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Administrasi Negara angkatan 2016.

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, penulis masih banyak terdapat kekurangan yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan. Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang membangun selalu diaharapkan penulis demi kesempurnaan proposal ini. Semoga proposal ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum,Wr.Wb.

Teluk Kuantan, 10 Oktober 2019

Penulis

MONICA VIVILANDA

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitain	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II Landasan Teori	10
2.1 Tinjauan Pustaka	10
2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara.....	10
2.1.2 Teori/Konsep Administrasi Pembangunan.....	12
2.1.3 Teori/Komsep Kebijakan Publik	13
2.1.4 Teori/Konsep Implementasi Kebijakan.....	17
2.1.5 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	23
2.1.6 Teori/Konsep Agropolitan.....	25
2.2 Kerangka Pemikiran.....	27
2.3 Hipotesis Kerja.....	30
2.4 Definisi Operasional	30
2.4.1 Operasional Variabel.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Populasi dan Sampel	34
3.3 Sumber Data Penelitian.....	36
3.4 Fokus Penelitian.....	36

3.5 Lokasi Penelitian.....	37
3.6 Waktu Penelitian.....	37
3.7 Metode Penelitian	37
3.7.1 Wawancara	37
3.7.2 Kuesioner	38
3.7.3 Observasi.....	38
3.7.3 Dokumentasi.....	39
3.8 Metode Analisa Data.....	39
3.9 Jadwal Kegiatan Penelitian	40
DAFTAR PUSTAKA	41

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Operasional Variabel	32
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel	35
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa . Pembangunan Desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat membuat sektor pertanian dikesampingkan.

Pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi hasil saja, tetapi juga memperhatikan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di wilayahnya. Pembangunan pertanian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Pertanian harus didorong pertumbuhannya melalui kebijakan yang diformulasikan secara tepat. Kebijakan pembangunan pertanian ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa produk pertanian yang dihasilkan harus memenuhi syarat kuantitas, kualitas dan kontinuitas sehingga mempunyai daya saing. Pembangunan secara otonom harus

menekankan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan melalui penggunaan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal.

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa “penataan kawasan perdesaan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat perdesaan, pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya, konservasi sumber daya alam, pelestarian warisan budaya lokal, pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan dan penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan”.

Sehingga pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan sumberdaya yang dimiliki termasuk untuk menumbuhkan sektor ekonomi daerahnya melalui pengembangan Kawasan Strategis. Agar tujuan pembangunan dapat tercapai, penting untuk merencanakan pembangunan berbasis sumberdaya lokal dengan pendekatan pembangunan wilayah dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya.

Kawasan agropolitan merupakan alternatif solusi untuk pembangunan masyarakat di wilayah perdesaan. Konsep pembangunan kawasan agropolitan, tidak semata-mata ditujukan kepada pembangunan fisik material tetapi juga sekaligus harus dikaitkan dengan pembangunan masyarakat/sumberdaya manusia secara langsung. Titik berat pembangunan masyarakat memerlukan pendekatan yang bersifat integral dan terpadu, artinya pembangunan yang akan dilaksanakan tidak hanya menyangkut pembangunan struktur fisik, tetapi sekaligus pembangunan manusia dengan pendekatan yang berimbang.

Kawasan agropolitan harus mempunyai keterkaitan yang harmonis antara pendekatan yang *top down* dengan pendekatan *bottom up* yang bertujuan untuk mencapai efek ganda. Keberhasilan pengembangan agropolitan juga sangat ditentukan oleh dukungan dan respon positif dari pemerintah kabupaten dan provinsi selaku stakeholder utama dalam pengembangan agropolitan. Aspek yang terkait dalam agropolitan meliputi : pengembangan sumber daya alam, sumberdaya manusia, sistem dan usaha pertanian, permodalan, prasarana dan sarana, kelembagaan, dan aspek-aspek penunjang lainnya.

Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kota Teluk Kuantan sebagai ibukota Kabupaten Kuantan Singingi yang dibatasi oleh batangan Sungai Kuantan. Potensi unggulan Desa Seberang Taluk terutama adalah sektor pertanian dalam arti luas. Untuk mewujudkan Desa Seberang Taluk sebagai Kawasan Agropolitan telah disusun rencana kegiatan dalam dua tahap yaitu kegiatan pembangunan jangka pendek (2016-2018) dan kegiatan pembangunan jangka menengah (2019-2020).

Besarnya potensi desa Seberang Taluk dalam pertanian belum dimanfaatkan dengan optimal. Pengelolaan lahan dan sistem budidaya masih bersifat tradisional yang kental dengan tradisi nenek moyang. Khusus Desa Seberang Taluk memiliki potensi untuk mengembangkan sebagai kawasan yang disebut Agropolitan . Disamping memiliki lahan pertanian yang cukup luas, juga karakter masyarakat yang secara umum merupakan petani dianggap sangat mendukung untuk mewujudkan program tersebut. Tentunya keberadaan Desa

Seberang Taluk perlu didukung oleh desa dan kelurahan lainnya khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah sehingga pembangunan setiap desa/lurah akan terintegrasi secara baik.

Bahkan dari pada itu Desa Seberang Taluk memiliki beberapa keunggulan yang mendukung terwujudnya Kawasan Agropolitan (kota pertanian), diantaranya:

1. Keunggulan secara geografis

- a. Termasuk dalam wilayah Kota Teluk kuantan dalam RTRW Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Terhubung oleh dua jembatan
- c. Tempat arena pacu jalur sebuah kegiatan budaya unggulan yang sudah menjadi *event* nasional
- d. Salah satu sisi pusat desa adalah Sungai Batang Kuantan

2. Keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Penyuluh Pertanian Desa Seberang Taluk menerima penghargaan dari Bapak Presiden Republik Indonesia di Istana Negara tahun 2012 sebagai Penyuluh Pertanian Terbaik Nasional
- b. Ketua Kelompok Tani Seberang Taluk menerima penghargaan dari Bapak Presiden Republik Indonesia di Istana Negara tahun 2013 sebagai Petani Terbaik Nasional
- c. Pengurus kelompok dan Anggota Kelompok Tani Sektor Pertanian dalam arti luas (sawah, sayur, tanaman keras/ perkebunan, perternak, perikanan dan lain-lain) yang relative sudsh cukup mumpuni dibidangnya.

- d. Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kapasitas, kapabilitas dan kualitas yang cukup baik

3. Keunggulan Sumber Daya Alam (SDA)

- a. Memiliki lahan yang cukup luas untuk pengembangan agrobisnis dalam arti luas (Tanaman Palawija, Tanaman Pangan, Holtikura (sayur, buah dan bunga), tanaman keras/ perkebunan, Perikanan darat/kolam, peternakan (padang penggembalaan) dan lain-lain) dan serta untuk pengembangan agroindustri
- b. Memiliki areal hutan primer sekitar tiga hektar
- c. Sisi sebelah Barat wilayah desa seluruhnya merupakan sungai Batang Kuantan dan seratus persen arena pacu jalur berada dalam wilayah Desa Seberang Taluk
- d. Bebas dari dampak negative/pencemaran penambangan liar (PETI)
- e. Sebagian besar areal tanaman keras adalah tanaman karet tua (tahun tanam 1985-1987) yang sudah harus diremajakan sehingga akan memudahkan penataan penanaman untuk kepentingan agrowisata.

Jenis program Agropolitan di Desa Seberang Taluk berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 274/VIII/2016 tentang Penetapan Kawasan Agropolitan Dan Perwilayahan Komoditi Sektor Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi yakni :

- 1) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian komoditi tanaman pangan meliputi :
 - a. Cetak sawah baru (CSB)

- b. Rehab Sawah Terlantar (RST)
 - c. Peningkatan Indeks Pertanaman dari IP100 menjadi IP200
 - d. Pengembangan Penagkaran benih padi
 - e. Pengembangan beras organik
 - A. Jagung (Pada lokasi peremajaan kebun karet tua)
 - B. Kedele (pada lokasi peremajaan kebun karet tua)
 - C. Sorgum (pada lokasi peremajaan kebun karet tua)
 - D. Pengembangan penggunaan alsintan modern meliputi :
 - a. Pengadaan alsitan
 - b. Pembentukan Unit Pengelolaan Jasa Alsitan (UPJA)
- 2) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian komoditi hortikultura meliputi :
- A. Sayuran sayuran melalui pengembangan budidaya aneka sayuran
 - B. Buah-buahan meliputi :
 - a. Pengembangan budidaya aneka buah
 - b. Pembangunan kebun induk buah
 - c. Pembangunan kebun koleksi buah
 - d. Pengembangan penangkar bibit buah-buahan
 - C. Tanaman hias melalui :
 - a. Pengembangan budidaya aneka tanaman hias
 - b. Pengembangan penangkaran bibit tanaman hias
- 3) Pengembangan sub sektor perkebunan komoditi :
- A. Kelapa sawit melalui :

- a. Pengembangan budidaya kelapa sawit
 - b. Pengembangan penangkar bibit kelapa sawit
 - B. Karet melalui :
 - a. Pengembangan budidaya karet
 - b. Pengembangan penangkar bibit karet
 - C. Kakao melalui :
 - a. Pengembangan budidaya kakao
 - b. Pengadaan mesin pengeringan dan pemisah biji kakao
- 4) Pengembangan sub sektor pertanian meliputi :
- A. Pengembangan budidaya perikanan
 - B. Pembangunan kolam baru
 - C. Renovasi kolam terlantar
 - D. Pengembangan penangkar benih ikan
- 5) Pengembangan sub sektor peternakan komoditi :
- A. Sapi melalui :
 - a. Pengembangan budidaya sapi
 - b. Pengembangan penggemukan sapi
 - c. Pengembangan perbibitan sapi
 - B. Ayam melalui :
 - a. Pengembangan budidaya ayam pedaging
 - b. Pengembangan budidaya ayam petelur
 - C. Itik melalui :
 - a. Pengembangan budidaya itik pedaging

b. Pengembangan budidaya itik petelur

6) Pengembangan sub sektor ketuhanan khususnya Hutan Wisata :

- A. Penataan hutan wisata
- B. Pemberian nama spesies kayu
- C. Pembuatan batas hutan wisata
- D. Pengembangan penangkar bibit kehutanan
- E. Penghijauan tepi arena pacu jalur

Tujuan utama Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing.

Daerah Seberang Taluk yang menjadi pusat pertumbuhan merupakan wilayah inti bagi desa-desa di sekitarnya. Pusat pengembangan kawasan agropolitan berada di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah. Fungsi wilayah pusat pertumbuhan ini adalah sebagai kawasan penggerak kegiatan ekonomi bagi daerah-daerah pendukung disekitarnya.

Tahap Awal pembangunan Kawasan Agropolitan merupakan pembukaan jalan baru serta pengaspalan jalan Rimbo rawang menuju Mudiak Kobun, membuka jaringan listrik pada zona-zona pengembangan kawasan Agropolitan, serta pembangunan jaringan aliran irigasi.

Perencanaan kawasan Agropolitan merupakan perencanaan yang bersifat komprehensif yang berbasis pada pengembangan pertanian. Bentuk perencanaan Desa Seberang Taluk menjadi kawasan Agropolitan mencakup aspek :

1. Rencana Struktur Ruang Kawasan Agropolitan
2. Tipologi Kawasan Agropolitan
3. Rencana Tata Guna Lahan
4. Rencana Pengembangan Wisata

Namun, Kenyataannya Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan ini belum terlaksana sampai saat dikarenakan kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat tidak banyak mengetahuinya, Alokasi dana yang sehingga sarana dan prasarana belum dibangun.

Peneliti menganggap permasalahan sangat penting dibahas tentang Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk mendukung permasalahan ini peneliti mengambil judul “ **Implementasi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana Implementasi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah. Secara umum penelitian yang berhubungan dengan masalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penulisan

Di dalam penelitian ini, penulis mengharapkan terdapat manfaat antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu mengembangkan Ilmu Administrasi Negara khususnya terkait Implementasi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya khususnya tentang Implementasi Kebijakan.

1.4.2.2 Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial khususnya dan Universitas pada umumnya.

1.4.2.3 Bagi Tempat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa poin-poin implementasi yang mungkin perlu adanya langkah perbaikan untuk kebaikan pembangunan desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

a. Pengertian Administrasi

Menurut Parajudi Atmosudirjo (dalam Syafiie 2014:11) administrasi merupakan fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat administrasi.

Menurut Leonard D. White (dalam Syafiie 2014:12) administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintahan maupun militer, baik ukuran dalam ukuran besar maupun kecil.

Menurut Hadart Nawawi (dalam Syafiie 2014: 13) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Administrasi dalam arti sempit dapat diarti sebagai catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, kegiatan menyusun keterangan-keterangan secara sistematis, dan pencatatan secara tertulis untuk didokumentasikan. Sedangkan dalam arti luas ada lebih dari empat puluh lima lebih definisi administrasi. ciri-ciri yang sangat mendasar adalah adanya

kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih, adanya kerja sama dari kelompok tersebut, adanya kegiatan atau proses, adanya bimbingan kepemimpinan dan adanya tujuan yang telah disepakati

b. Pengertian Negara

Menurut Aristoteles (dalam Syafiie 2010:20) Negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.

Menurut Jean Bodin (dalam Sayfiie 2010:20) Negara adalah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat.

Menurut Bluntschli (dalam Syafiie 2010:20) Negara adalah suatu diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik disuatu daerah tertentu.

Menurut Sumantri (dalam Syafiie 2010:20) Negara adalah suatu organisasi kekuasaan oleh karenanya dalam setiap organisasi yang bernama Negara selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapa pun juga yang bertempat tinggal didalam wilayah kekuasaannya.

Dengan demikian, Negara adalah suatu kelompok, persekutuan, alat, organisasi kewilayahan/kedaerahan, sistem politik, kelembagaan dari suatu rakyat, keluarga, desa baik yang terdiri dari orang-orang yang kuat maupun yang lemah yang merupakan susunan kekuasaan yang memiliki monopoli, kewibawaan, kedaulatan, hukum, kepemimpinan bahkan sistem pemaksaan, sehingga pada akhirnya diharapkan akan memperoleh keabsahan, pengakuan dari dalam dan luar Negara, tempat tinggal yang aman, masyarakat yang tentram,

bangsa yang teratur, hidup bersama yang lebih baik dan terkendali dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita rakyat banyak.

c. Pengertian Administrasi Negara

Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislative, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan public yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggaraan Negara.

Menurut Waldo (dalam Anggara, 2016:134) Administrasi Negara sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian (dalam Anggara, 2016:135), Administrasi Negara merupakan keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai suatu tujuan Negara.

Definisi diatas memberikan gambaran bahwa dalam organisasi terdapat unsur-unsur seperti adanya kelompok yang dikenal, adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi saling keterkaitan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2.1.2 Teori/Konsep Administrasi Pembangunan

a. Pengertian Administrasi Pembangunan

Definisi administrasi pembangunan menurut beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Mustopadidjaja (dalam Sumantri, 2016:24) mengatakan administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana

pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Sumantri, 2016:24) Administrasi Pembangunan adalah rangkaian usaha dalam mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa atau negara mencapai modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).

Menurut J.B Kristadi (dalam Sumantri, 2016:24) Administrasi Pembangunan adalah administrasi negara yang mampu mendorong ke arah proses perubahan, pembaharuan, dan penyesuaian serta pendukung suatu perencanaan.

Menurut Paul Meadows (dalam Sumatri, 2016:26) Administrasi Pembangunan dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengatur masyarakat dibidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik.

Menurut Fred W. Riggs (dalam Afifuddin, 2015:46) Administrasi pembangunan menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program-program, atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan.

Menurut Thompson (dalam Afifuddin, 2015:46) Administrasi Pembangunan meliputi kemampuan organisasi untuk melakukan pembaharuan.

Menurut Montgomery dan Esman (dalam Afifuddin, 2015:46) Administrasi Pembangunan meliputi perbaikan aparatur serta pelaksanaan dari pemerintah (*The Development of Administration*) dan juga berarti perbaikan dan pelaksanaan usaha pembangunan (*Administration Of The Development*).

Dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah seluruh proses yang akan dilakukan oleh administrator dalam upaya untuk mendorong dan untuk memberikan pengawasan terhadap masyarakat ke arah modernisasi dan kebaikan yang multi-dimensional secara terpadu dan administratif.

2.1.3 Teori/Konsep Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan

Istilah *policy* (kebijakan) dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani san Sansekerta polis (negara-kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi.

Pada perkembangan istilah *policy* (kebijakan) seringkali penggunaan saling berkaitan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. Untuk lebih jelasnya berikut ini beberapa definisi kebijakan menurut beberapa tokoh sebagai berikut. Friedrich (dalam Winamo, 2012:20) memandang sebagai berikut suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.

Definisi tersebut mengartikan bahwa kebijakan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah saja akan tetapi bisa saja melalui usulan individu dimana dalam realisasinya akan menimbulkan hambatan atau peluang bagi para sasaran kebijakan. Jones (dalam Winarto, 2012:19) pula menyebutkan istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standar, proposal, dan *grand design*.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan merupakan kegiatan yang tidak jauh dengan apa yang kita lakukan sehari-hari untuk sebagai landasan apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan. Suharto (2013:3) mengatakan kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu Negara”

Menurutnya, kebijakan merupakan hal yang luas yang menyangkut pemerintah dan nitizen. Dimana hal tersebut mengatur sedemikian rupa kehidupan di suatu pemerintahan. Marlowe (dalam Wicaksono,2006:56) : “Kebijakan adalah

sebuah upaya untuk menciptakan atau merekayasa sebuah cerita dalam rangka mengamankan tujuan-tujuan si perekayasa”. Istilah kebijakan mengandung arti yang sama dengan pengertian kebijaksanaan, seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli James (dalam Wahab, 2005:2), yang merumuskan : “ Kebijaksanaan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian akrot dalam suatu bidang kegiatan tertentu”.

Ali dan Alam (2012:7) mengatakan kebijakan sebagai studi haruslah diartikan sebagai pertanyaan kehendak yang diikuti oleh unsur pengaturan dan atau paksaan, sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.

Heclo (dalam Parsons, 2008:14) mengatakan Kebijakan (*policy*) adalah istilah yang tampak banyak disepakati bersama. Dalam penggunaannya yang umum, istilah kebijakan dianggap berlaku untuk sesuatu yang lebih besar ketimbang keputusan tertentu, tetapi lebih kecil ketimbang gerakan sosial. Jadi kebijakan dari sudut pandang tingkat analisis adalah sebuah konsep yang kurang berada ditengah-tengah. Konsep yang menjembatani antar atas dan bawah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Dengan demikian, dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan mengenai arti dari kebijakan yakni suatu sikap yang diambil seseorang, kelompok, organisasi atau instansi pemerintah dalam menentukan sebuah keputusan guna merubah kondisi seseorang, kelompok, organisasi atau instansi pemerintah tersebut untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Pengertian Publik

Istilah publik dapat didefinisikan sebagai kata benda (*the public*) yang berarti masyarakat secara umum atau kesamaan hak dalam masyarakat sebagai kata sifat (*public*) yang berarti sesuatu hal yang disediakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk digunakan oleh masyarakat secara menyeluruh seperti menyediakan lapangan pekerjaan, hiburan, pelayanan, pendidikan dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, kata publik berarti negara atau umum. Namun dalam kenyataannya, kata publik masih dapat dimaknai lebih dari satu makna dan salah satunya *Public Administration* yakni Administrasi Negara dengan *Romm Public* yakni ruangan untuk umum.

Menurut Habermas (dalam Parsons, 2008:5) pengertian publik adalah Sebagai ruang yang bebas dari intervensi ekonomi dan bisnis, dan ruang dimana ada batas yang jelas antara ruang publik dan privat, jelas bertentangan dengan pandangan tradisi Eropa kontinental yang menganggap ruang publik sebagai ruang yang mencakup dunia bisnis dan perdagangan, di mana cakupan kehidupan privat jauh lebih luas ketimbang yang dipahami dan dikembangkan di Britania (Inggris) dan Amerika.

2.1.4 Teori/Konsep Implementasi Kebijakan.

Teori George C.Edwards (dalam Agustino, 2017 :136)

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi

yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang SOP (*Standard Operating Procedures*). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Teori Menurut Charles O.Jones (dalam Agustino, 2017 : 154).

Dimensi implementasi kebijakan publik dirumus oleh Charles O. Jones terdiri dari organisasi, interpretasi dan aplikasi yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Organisasi

Organisasi adalah kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali lembaga, sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Karena itu, untuk mencapai tujuan, implementor atau pemerintah harus melakukan tindakan berupa penghimpunan sumber daya dan pengelolaan sumber daya tersebut.

Organisasi memiliki sistem kewenangan, status, kekuasaan serta manusia. Kelompok didalam organisasi juga mempunyai pengaruh yang kuat atas perilaku

individu dan kinerja organisasi. Prilaku seseorang di setiap situasi melibatkan interaksi karakteristik personal dan karakteristik situasi.

Organisasi dikenal dari tiga ciri dasar. Pertama, adanya kewenangan yang cukup. Kedua, adanya status dari organisasi. Ketiga, adanya kekuasaan. Kewenangan yang cukup dan memadai akan membuat pelaksana lebih berdaya menggerakkan sarana dan prasarana yang ada dalam organisasi. Status menjadikan organisasi memiliki fokus. Adanya kekuasaan yang dimiliki para pejabat akan memungkinkan organisasi menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik.

Dengan demikian jika dilihat dari uraian diatas, indikator organisasi meliputi pembentukan unit-unit (penataan kembali), adanya kewenangan yang cukup, adanya kejelasan prosedur/aturan yang jelas, serta menghindari tugas-tugas yang tumpang tindih (*Overlapping*), terutama menghadapi tuntutan publik akan layanan yang semakin bermutu

2. Interpretasi

Keberhasilan suatu kebijakan yang terpenting adalah adanya pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan penerimaan dengan penuh kesadaran karena itu perlu diupayakan adanya saling pengertian antara aparat pelaksana dengan masyarakat. Artinya jika terjadi kekaburan interpretasi (penafsiran) antara implementor (pelaksana) dengan penerima manfaat kebijakan, maka kebijakan itu akan sulit ditetapkan.

Interpretation adalah menafsirkan agar program menjadi rencana yang kongkrit dan jelas serta dapat dilaksanakan. Dalam proses implementasi, birokrasi pemerintah yang berperan sebagai organisasi pelaksana (implementor) perlu

menginterpretasikan dengan cara pandang yang sama agar program lebih operasional dan siap dilaksanakan. Indikator interpretasi (penafsiran) yang sama apabila telah ada kejelasan atau cara pandang yang sama, seperti kejelasan tugas, harus ada interpretasi yang sama dikalangan implementor. Dengan demikian konsistensi para implementor terhadap tugas yang akan dilaksanakan. Hal lain yang penting adalah para implementor harus membuat skala prioritas (utama) dalam pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan. Demikian juga komitmen para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

Sesungguhnya, menginterpretasikan kebijakan menjadi satu cara pandang yang sama bukanlah hal yang mudah, sebab bisa jadi para pelaksana berbeda pandangannya dengan atasan mereka, dan juga berbeda dengan pandangan para pembuat kebijakan.

3. Aplikasi

Aplikasi adalah ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program. Dengan aplikasi kebijakan akan dapat diketahui apakah lingkungan menerima atau menolak implementasi dan hasil kebijakan tersebut. Karena itu, mengaplikasikan kebijakan bukanlah hal yang mudah, bahkan bisa menimbulkan tantangan yang harus dihadapi implementor.

Apabila suatu kebijakan publik ingin berhasil dilaksanakan, maka kebijakan tersebut perlu dilakukan atau dirumuskan kembali untuk mendapatkan masukan. Sebab yang sering terjadi adalah pengambilan kebijakan cenderung merumuskan masalah yang dihadapi oleh kelompok sasaran, namun tidak mendefinisikan masalah tersebut.

Teori Merilee S. Grindle (dalam Agustino, 2017 : 142)

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle yang menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan (konteks) implementasi, kedua hal tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana. variabel isi kebijakan menurut Grindle mencakup beberapa indikator yaitu:

1. Kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group.
3. Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan.
4. Letak pengambilan keputusan.
5. Pelaksanaan program telah disebutkan dengan rinci, dan
6. Dukung oleh sumber daya yang dilibatkan.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup 3 indikator yaitu:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. Karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berkuasa.
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan.

Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

Teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn (dalam Agustino, 2017:133)

Menurut meter dan horn, ada enam variable yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni:

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
2. Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resource*).
3. Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
4. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola- pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

2.1.5 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai salah satu faktor kritis dalam implementasi kebijakan publik. Sumber daya sangat penting dalam implementasi kebijakan karena didalam meliputi staf dengan ukuran cukup, keterampilan yang sesuai untuk penyelesaian tugas mereka, nilai dan etika, serta otorita maupun fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan tertulis (kebijakan) menjadi fungsi pemerintahan. Jadi, sumber daya terdiri atas beberapa jenis yaitu staf, informasi, otoritas, dan fasilitas layanan.

Menurut Hasibuan (dalam Taufiqurokhman, 2009:3) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Menurut Simamora (dalam Taufiqurokhman, 2009:3) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah,pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok karyawan, juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir,evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik.

Menurut Kiggundu (dalam Rosidah, 2009:13), manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan pegawai dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran individu, organisasi, masyarakat, bangsa dan internasional.

Sedangkan menurut Mangkunegara (2011:2) manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Handoko (2011:4), manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan maupun organisasi.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Proses tersebut mencakup kegiatan-kegiatan perencanaan dan pengadaan tenaga kerja, seleksi dan penempatan pegawai, pengembangan personil melalui pendidikan dan pelatihan, integrasi personil kedalam organisasi dan pemeliharaannya termasuk dalam hal pemberian imbalan, penilaian terhadap hasil kerja, juga pengembangan karier dan pemberhentian personil.

2.1.6 Teori/Konsep Agropolitan

Secara harafiah. istilah Agropolitan berasal dari kata Agro yang berarti ‘pertanian’ dan Polis/Politan yang berarti ‘kota’. Dalam buku Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan & Pedoman Program Rintisan Pengembangan Kawasan Agropolitan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, Agropolitan didefinisikan sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karenaberjalannya sistem dan usaha agribisnis sehingga mampu

melayani, mendorong, menarik, serta menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Buku tersebut juga mendefinisikan Kawasan Agropolitan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yang ditandai dengan keberadaan pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya sehingga terbentuklah Kawasan Agropolitan.

Definisi Kawasan Agropolitan pun telah termasuk dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan Kawasan Agropolitan sebagai kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan Agrobisnis. Adapun konsep Agropolitan merupakan konsep yang dikenalkan Friedman dan Douglas 1975 (dalam Agropolitan dan Minapolitan kegagalan pengembangan sektor industri yang terjadi dialami negara-negara berkembang di Asia. Kegagalan tersebut mengakibatkan terjadinya *hyper urbanization*, pembangunan hanya terjadi di beberapa kota saja, tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi, kemiskinan akibat pendapatan yang tidak merata, terjadinya kekurangan bahan pangan, penurunan kesejahteraan masyarakat desa, serta ketergantungan kepada dunia luar.

Kota Pertanian mampu mendorong pertumbuhan pembangunan perdesaan dan desa-desa di wilayah sekitarnya melalui pengembangan berbagai sektor, mulai dari pertanian, industri kecil, jasa pelayanan, hingga pariwisata. Pengembangan Kawasan Agropolitan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan

dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterikatan desa dan kota. Hal ini dapat terwujud melalui pengembangan sistem dan usaha Agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi di Kawasan Agropolitan.

Konsep agropolitan (dalam Pranoto, 2007:115) muncul dari permasalahan adanya ketimpangan pembangunan wilayah antara kota sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dengan wilayah perdesaan sebagai pusat kegiatan pertanian yang tertinggal.

Salah satu ide pendekatan pengembangan perdesaan adalah mewujudkan kemandirian pembangunan perdesaan yang didasarkan pada potensi wilayah itu sendiri. Dalam konteks pengembangan agropolitan menyebutkan ada tiga isu utama yang perlu mendapat perhatian:

1. Akses terhadap lahan pertanian dan air;
2. Devolusi politik dan wewenang administratif dari tingkat pusat ke tingkat lokal dan
3. Perubahan paradigma atau kebijakan pembangunan nasional untuk lebih mendukung diversifikasi produk pertanian.

Oleh karena itu, agropolitan dipandang sebagai suatu pendekatan pembangunan melalui gerakan masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis pertanian (*agribisnis*) secara terpadu dan berkelanjutan pada kawasan terpilih melalui pengembangan infrastruktur perdesaan yang mampu melayani, mendorong, dan memacu pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya.

Menurut Soenarno (dalam Djakapermana, 2003: 3) *issue* dan permasalahan pembangunan perdesaan yang terjadi, pengembangan kawasan agropolitan merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah (perdesaan). Kawasan agropolitan disini diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya membentuk kawasan agropolitan

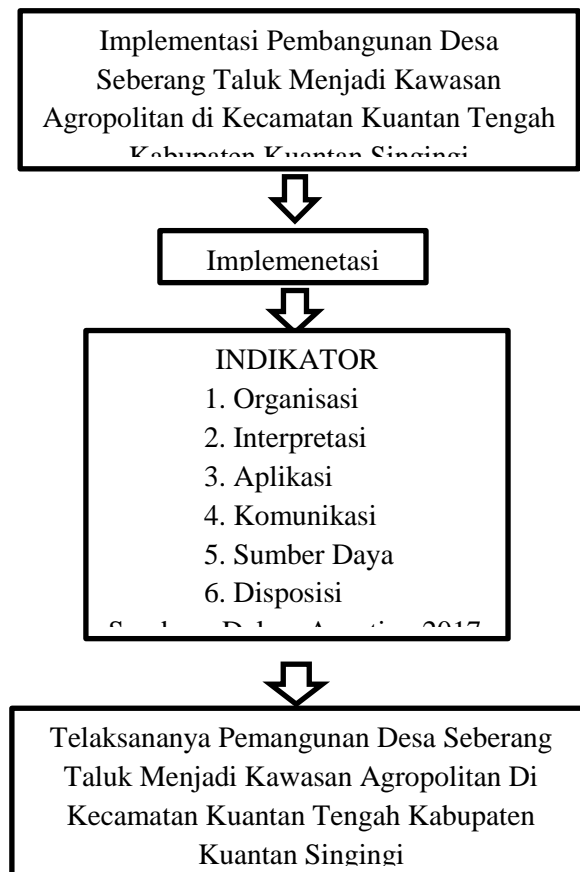
2.2 Kerangka Pemikiran

Peneliti mengamati implementasi berdasarkan dari tindakan yang dilakukan Kepala Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah dalam mengimplementasikan Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan .

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Implementasi dari Charles O. Jones serta teori Goerge C.Edwards III karena kedua teori memiliki faktor penentu dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Peneliti mengamati implementasi berdasarkan dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam mengimplementasikan Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan . Untuk melihat apakah implementasi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan, peneliti menggunakan faktor dari teori dari Charles O. Jones serta George C. Edwards.

Dengan demikian indikator yang peneliti gunakan untuk mengetahui proses Implementasi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan yaitu tertera pada gambar berikut :

Gambar 2.1: Kerangka Pikir Penelitian Tentang Implementasi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber: Modifikasi Peneliti 2019

2.3 Hipotesisi Kerja

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan diatas, peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka dapat dibuat asumsi dasar dalam penelitian ini merupakan anggapaan peneliti terhadap permasalahan yang diteliti. Maka peneliti berasumsi bahwa pelaksanaan ataupun implementasi pembangun desa Seberang Taluk menjadi kawasan Agropolitan di

kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singngi belum terlaksana dan berjalan dengan baik.

2.4 Definisi Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan ini maka peneliti perlu membuat konsep operasional agar pembaca mudah memahami maksud dan tujuan peneliti ini, diantaranya :

- 1.4.1 Organisasi, yaitu kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali lembaga, sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.
- 1.4.2 Interpretasi, yaitu menafsirkan agar program menjadi rencana yang kongkrit dan jelas serta dapat dilaksanakan.
- 1.4.3 Aplikasi, yaitu ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program.
- 1.4.4 Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, diaman yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi
- 1.4.5 Sumber Daya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan ,maka implementasi tidak akan berjalan

efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

1.4.6 Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, Edward III(1980;98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan isentif.

2.4.1 Operasional Variabel

Operasional variable dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk table, uraian konsep, variable, indikator ukuran skala dan skala dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat.

Tabel 2.1 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Implementasi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Ukuran
Implementasi	1. Organisasi	a. Pembentukan organisasi b. Kewenangan organisasi c. Kejelasan organisasi d. Struktur organisasi	Terimplementasi. Belum Terimplementasi tidak Terimplementasi
	2. Interpretasi	a. Kejelasan Tugas b. Konsistensi pelaksanaan tugas c. Skala prioritas d. Komitmen	Terimplementasi. Belum Terimplementasi tidak Terimplementasi
	3. Aplikasi	a. Penerapan b. Penilaian Pelaksanaan c. Pencapaian	Terimplementasi. Belum Terimplementasi tidak Terimplementasi
	3. Komunikasi	a. Bagaimana sosialisasi mengenai kebijakan b. Metode yang digunakan dalam sosialisasi pelaksanaan kebijakan c. Intensitas komunikasi aparatur birokrasi dengan masyarakat (petani).	Terimplementasi. Belum Terimplementasi tidak Terimplementasi
	5. Sumber Daya	a. Kemampuan Birokrat dalam sosialisasi kebijakan b. Tingkat Pendidikan birokrat dalam masyarakat c. Ketersediaan dan yang dialokasikan untuk pelaksanaan implementasi kebijakan	Terimplementasi. Belum Terimplementasi tidak Terimplementasi

	6. Disposisi Charles O. Jones (Dalam Agustino 2017: 154)	a. Karakter pelaksanaan kebijakan b. Tingkat komitmen dan kejujuran pelaksanaan kebijakan c. Tingkat demokratis pelaksanaan kebijakan	Terimplementasi. Belum Terimplementasi tidak Terimplementasi
--	--	---	--

Sumber : Modifikasi Peneliti 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif yang bersifat deskriptif. Menurut H.B Sutopo, (2002:39) Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian Kualitatif lebih menekankan pada makna, lebih menfokuskan pada data kualitas dengan analisis kualitatifnya. Dengan kata lain penelitian kualitatif lebih menekankan pada mana, tidak ditentukan oleh kuantitasnya tetapi lebih ditentukan oleh proses terjadinya dan cara memandang perspektifnya. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variable-variabel yang ada dalam penelitian ini.

Sedangkan penelitian kuantitatif merupakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistic karena berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel pada umumnya bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Mukti Fajar (dalam Achmad 2010:23) Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.

Menurut Arikunto (dalam Sugioyono, 2014 : 297) Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Jadi populasi bias diartikan secara umum yaitu bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada pokok subjek/objek yang akan dipelajari , tetapi meliputi keseluruhan dari karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek yang akan diteliti.

Jadi populasi wilayah generalisasi yang terdiri atas objek maupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

3.2.2 Sampel

Menurut Fajar Mukti (dalam Sugioyono, 2014:118) sampel adalah bagian dari jumlah data dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Menurut Arikunto (dalam Sugioyono, 2014:299) Sampel sebahagian populasi yang dijadikan sebagai objek dan sumber data serta informasi dalam penelitian yang dianggap mewakili dari suatu penelitian.

Dengan jumlah populasi yang banyak, maka yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah

Tabel 3.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Implementansi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Responden	Populasi	Sampel
1.	Kepala Desa	1	1
2.	Sekretaris Desa	1	1
3.	Ketua BPD	1	1
4.	Masyarakat (petani)	936	20
Jumlah		939	23

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2019

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh peneliti menggunakan metode *Sampling Purposive* dan *Sampling Kuota*. Teknik *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Yang menjadi subjek dengan menggunakan teknik *Sampling Purposive* adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan BPD. Hal ini dilakukan dianggap mampu memberikan informasi tentang pembangunan desa menjadi kawasan Agropolitan.

Sedangkan *Sampling Kuota* adalah teknik untuk menentukan sampel dan populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. Subjek *Sampling Kuota* adalah masyarakat yang pekerjaannya sebagai petani yang paling mengetahui bagaimana kondisi secara keseluruhan dari Implementasi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Berada di daerah yang diteliti
2. Mengetahui kejadian/permasalahan
3. Terlibat langsung ataupun pengurus tentang Pembangunan Desa
Menjadi kawasan Agropolitan.

3.3 Sumber Data Penelitian

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat dijumpai kebenarannya, relevan dan lengkap. Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

3.3.1 Data Primer adalah data yang berkaitan dengan objek penelitian, pencatatan sumber data primer melalui wawancara, serta pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.

3.3.2 Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung melalui laporan-laporan, buku-buku, atau data-data yang telah diolah, seperti data yang dipublikasikan baik dalam bentuk surat kabar atau majalah maupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

3.4 Fokus Penelitian

Penelitian ini lebih berfokus kepada Implementasi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian harus benar-benar dipertimbangkan sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh dan tercapainya tujuan dari penelitian ini. Penelitian terkait judul Implementasi Pembangunan Desa

Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Pengambilan lokasi ini didasarkan beberapa pertimbangan antara lain karena waktu, biaya dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti, serta lokasi yang letaknya begitu strategis dan mudah dijangkau oleh peneliti.

3.6 Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Moleong, (2002:133) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua orang pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada aparat desa, petani dan masyarakat setempat . Peneliti secara langsung memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dalam bentuk daftar pertanyaan, kemudian langsung ditanyakan kepada para informan seperti yang telah disebutkan diatas. Selanjutnya jawaban dari informan ditulis dan direkam kemudian dikumpulkan atau dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumber data.

3.6.2 Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada respondenn untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien

apabila peneliti tahu dengan pasti variable yang akan diukur dan tahu apa yang bias diharapkan responden. Selain itu, responden juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas, kuesioner dapat berupa pertanyaan/pertanyaan tertutup maupun terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet (Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 2014).

3.6.3 Pengamatan (*Observasi*)

Menurut Arikunto, Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Selanjutnya menurut Poerwandari berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi didalamnya. Istilah observasi diturunkan dari bahasa Latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

3.6.4 Dokumentasi

Kata dokumen berasal dari bahasa Latin yaitu *decere*, berarti mengejar. Pengertian dari kata dokumen ini menurut Gottschalk, sering kali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yang pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua

peruntukan bagi surat-surat resmi dan surat Negara, seperti perjanjian, undang-undang, konsesi dan lainnya. Lebih lanjut Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.

3.7 Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan teknik penganalisaan secara deskriptif. Setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, maka data tersebut dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, selanjutnya akan dibahas dan dianalisa dalam dua bentuk. Data yang bersifat kualitatif akan diuraikan dengan lengkap dan rinci dalam bentuk kalimat, sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan ditabulasikan dalam bentuk table, barulah kemudian membandingkan dengan teori dan pendapat para ahli untuk kemudian dapat diambil kesimpulan dengan induktif.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kondisi Wilayah

Topologi Desa Seberang Taluk merupakan daerah daratan yang bergelombang (tanah datar berbukit-bukit) dengan kemiringan lereng 0-45 derajat dan ketinggian sekitar 25-30 meter dari permukaan laut. Jenis tanah yang ada di Desa Seberang Taluk adalah berwarna hitam dan gembur pada lapisan atasnya dan pada lapisan bawahnya berwarna kuning.

Sebuah sungai besar yaitu Sungai Kuantan (Sungai Indragiri) merupakan batas wilayah sebelah Utara Seberang Taluk. Sungai ini merupakan aliran dari sungai yang ada di provinsi Sumatera Barat dan bermuara ke Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir dahulunya. Sungai Kuantan sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Sungai ini berfungsi sebagai sarana transportasi, sumber air, irigasi, budidaya perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Namun sangat disayangkan kondisi Sungai Kuantan saat ini sudah tercemar oleh ulah para penambang (PETI) sehingga hanya berfungsi untuk sarana transportasi dan pariwisata.

Desa Seberang taluk Kecamatan Kuantan Tengah terletak di seberang kota Teluk Kuantan yang merupakan ibukota Kabupaten Kuantan Singingi. Pada sisi bagian Timur kota Teluk Kuantandan sisi Barat Desa Seberang Taluk, terbentang Sungai Kuantan yang membelah Kota Teluk Kuantan dan Desa Seberang Taluk. Sungai Kuantan in adalah lokasi Pacu Jalur yang merupakan even nasional yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Disisi bagian Timur Kota Teluk Kuantan telah ditata dalam bentuk Taman Jalur sebagai lokasi hiburan untuk masyarakat. Demikian juga dengan tebing sepanjang Sungai Kuantan dari hulu sampai hilir lokasi pelaksanaan Pacu Jalur telah di dam sebagai fasilitas tribun untuk pengunjung yang menyaksikan *event* tersebut.

4.2 Luas Wilayah

Desa Seberang Taluk memiliki luas wilayah 45.49KM² atau sekitar 4.5499 Ha. Terdiri dari 5 dusun dan 10 RW dan 20 RT dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kuantan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunung Toar
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Aro
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Seberang Taluk Hilir

4.3 Sejarah Desa

Desa Seberang Taluk berdiri pada tahun 1955 yang waktu itu Kecamatan Kuantan Tengah masih berstatus kewedanaan. Seiring dengan angin reformasi yang mulai berhembus pada tahun 1998, dan lahirnya Undang-Undang Nomor 05 Oktober 1999 mendorong keinginan Pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan pemekaran Kabupaten. Hal ini disambut positif oleh pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota

Batam. Maka sejak tanggal 12 Oktober 1999 kecamatan Kuantan Tengah menjadi bagian dari Kabupaten Kuantan Singingi.

4.4 Keadaan Penduduk

Desa Seberang Taluk memiliki penduduk sekitar 2.177 jiwa, dengan perincian sebanyak laki-laki 1.120 jiwa dan perempuan 1.057 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sekitar 696 Kepala Keluarga. Penduduk Desa ini menganut agama Islam, dan mayoritas yang tinggal di Desa ini adalah penduduk asli. Mereka yang menjadi warga pendatang adalah orang Jawa (2%). Sebagian kecil pendatang ini awalnya datang untuk bekerja dan membuka lahan. Pendatang Desa Seberang Taluk ini telah menetap selama 3 tahun di Desa dan telah meminta izin untuk tinggal di desa Seberang Taluk pada aparat Desa Seberang Taluk. Masuknya pendatang ke Desa Seberang Taluk sekitar tahun 1990-an, orang Jawa ini masuk ke Desa sebagai buruh tani dan untuk berdagang, seperti membuka warung kecil untuk berdagang.

Tabel 4.4 Keadaan Penduduk

NO	Usia	Jumlah
1.	0 - 17 tahun	584
2.	18-56	1.268
3.	56 ke-atas	325
Jumlah		2.177

Sumber Data: Kantor Desa Seberang Taluk, 2019

4.5 Sarana Ibadah

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari manusia itu sendiri, dimana kebebasan beragama telah diatur dalam UUD 1945 pasal 29. Sikap toleransi antar umat beragama, kerukunan sosial, dan saling menghormati

merupakan suatu hal yang perlu dipupuk demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 4.5 Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Surau	5
Jumlah		6

Sumber Data: Kantor Desa Seberang Taluk, 2019

4.6 Sarana Sosial dan Olahraga

Contoh kegiatan-kegiatan sosial yang ada di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

Tabel 4.6 Sarana Sosial dan Olahraga

No.	Sarana Kegiatan Sosial	Jumlah
1.	Balai Desa	1
2.	Lapangan Bola Kaki	1
3.	Lapangan Bola Volly	3
4.	Lapangan Bulu tangkis	3
5.	Lapangan Takraw	1
Jumlah		9

Sumber Data: Kantor Desa Seberang Taluk, 2019

4.7 Sarana Pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi masyarakat dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia yang merupakan pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan sebagai prioritas utama dari pelaksanaan pembangunan. Pendidikan perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai pada umumnya. Prasarana pendidikan merupakan gedung gedung sekolah yang ada di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang dibangun oleh pemerintah dan swasta yang berpartisipasi dalam membangun prasarana pendidikan.

Tabel 4.7.1 Sarana Pendidikan

NO	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD/Playgruop	1
2.	Tk	1
3.	SD	1
4.	MDA	1
Jumlah		4

Sumber Data: Kantor Desa Seberang Taluk, 2019

Tabel 4.7.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	51
2.	Sekolah Dasar (SD)	355
3.	SMP/Sederajat	380
4.	SMA/Sederajat	1.119
5.	Akademi/D1-D3	102
6.	Sarjana	161
7.	Pasca Sarjana /S2 dan S3	9
Jumlah		2177

Sumber Data : Kantor Desa Seberang Taluk,2019

4.8 Sarana Kesehatan

Adapun sarana kesehatan yang ada di Desa Seberang Taluk Kecamatan

Kuantan Tengah akan dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8 Sarana Kesehatan

No.	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Pusat Pelayanan Terpadu	1
2.	Pusat Kesehatan Desa	0
3.	Pusat Pembantu	0
Jumlah		1

Sumber Data : Kantor Desa Seberang Taluk,2019

Sarana kesehatan yaitu satu buah posyandu sekaligus sebagai tempat Praktek Bidan Desa. Sebagai sarana kesehatan Praktek bidan Desa yang berada di Desa ini sekaligus Pusat Bantu Desa.

4.9 Sarana Keamanan

Tabel 4.9 Sarana Keamanan

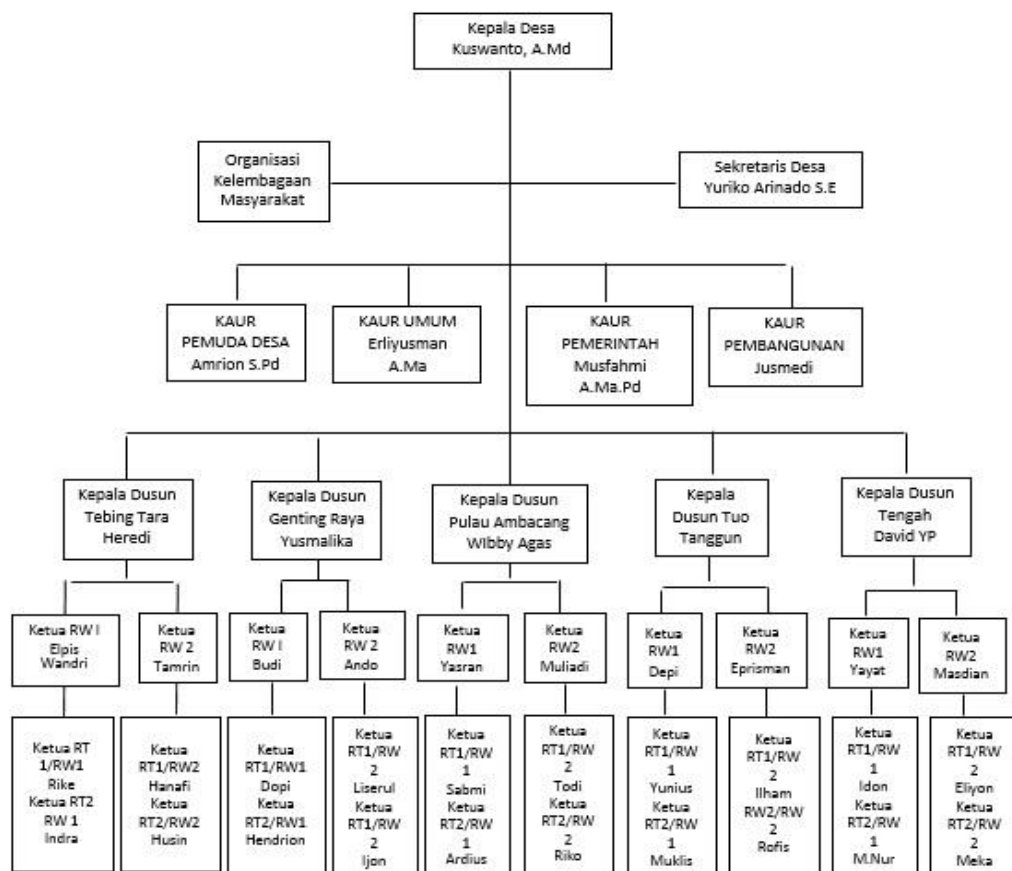
No.	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Kapolsek	0
2.	Pos Polisi	0
3.	Pos Ronda	4
Jumlah		4

Sumber Data: Kantor Desa Seberang Taluk, 2019

4.10 Struktur Pemerintahan

Pemerintahan memiliki peranan penting dalam pembangunan dan memberikan pelayanan berbagai kepentingan umum kepada masyarakat mulai dari masalah keamanan dan ketertiban, kesehatan, kependudukan dan sebagainya.

Gambar 4.10 Struktur Pemerintah Desa



Sumber Data : Kantor Desa Seberang Taluk. 2020

Berikut penjabaran bagian tugas dan fungsi dalam struktur organisasi pemerintahan di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

- a. Kedudukan : Alat pemerintah dan pelaksanan pemerintah Desa
- b. Tugas : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa , seperti tatapraja Pemerintahan, penetapan peraturan Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan pengelolaan wilayah.
 - b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
 - c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
 - d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
 - e) Menjaga hubungan kemitraan dengan Badan Permusyawaratan Desa.

2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

- a. Kedudukan: lembaga perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan pemerintah Desa
- b. Tugas : menggali, menampung, mengelola dan meyalurkan aspirasi masyarakat.
- c. BPD memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a) BPD sdibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa
 - b) Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa , menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

3. Sekretaris Desa

- a. Kedudukan : sebagai staf dibidang tata usaha Kepala Desa dan memimpin sekretaris desa
- b. Tugas : menyelenggarakan pembinaan dan administrasi pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, serta pelayanan ketatat usaha Desa.
- c. Fungsi : meelakukan urusan surat-menyurat , kearsipan, melaksanakan urusan keuangan dan urusan administrasi umum serta melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal bila Kepala Desa berhalangan.

4. Kelapa Urusan

- a. Kedudukan : sebagai tugas pembantu tugasnya masing-masing
- b. Tugas : melaksanakan kegiatan ketata usahaan dalam bidang tugasnya masing-masing
- c. Fungsi : melaksanakan pencatatan, pengumpulan, pengelolaan data, dan informasi yang menyangkut bidang tugasnya masing-masing.

5. Kepala Dusun

- a. Kedudukan : Sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya
- b. Tugas : melaksanakan pemerintahan Desa dibawah kepemimpinan Kepala Desa di wilayahnya kerjanya.

4.11 Visi Dan Misi

4.11.1 Visi

“Terwujudnya Masyarakat Desa Seberang Taluk Sebagai Desa Yang Maju, Mandiri, Berbadan Sehat Dan Beriman Kepada Allah Swt, Bertumpu Pada Keunggulan Potensi Dibidang Pertanian, Perdagangan Dan Industry Melalui Perwujudan Kawasan Agropolitan Dan *Water Front City* Untuk Mencapai Masyarakat Yang Sehat Cerdas Dan Sejahtera Lahir Bathin.”

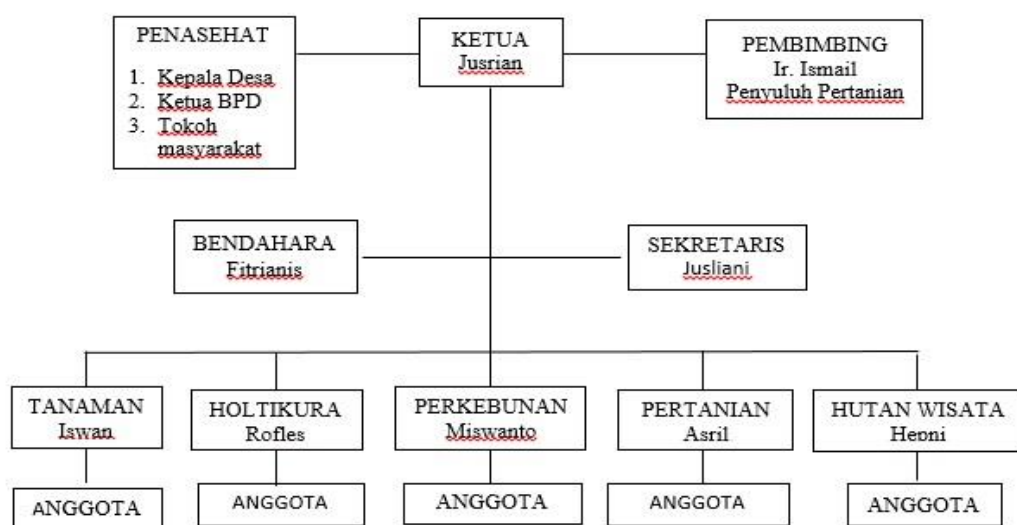
4.11.2 Misi

1. Mewujudkan kawasan agroipolitan (Kota Pertanian) melalui konsep Tri-Agro (Agro Bisnis, Agro Wisata, Agro Industri)
2. Mewujudkan kawasan *Water Front City*
3. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang mendukung perekonomian desa
4. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang

5. Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik
6. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan, perkebunan, dan kehutanan), industry perdagangan dan pariwisata (Tri agro/Agro bisnis, agro industri, dan agro wisata)
7. Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi penegakan hukum, berkeadilan, kesejahteraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat
8. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam unutm memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

4.12 Organisasi Pembangunan Agropolitan

Gambar 4.11 Struktur Organisasi Pembangunan Agropolitan



Sumber Data: Kantor Desa Seberang Taluk, 2020

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Demi menunjang keakuratan dalam penelitian maka perlu disajikan identitas responden dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Kepala Dusun, dan Masyarakat yang menyangkut jenis kelamin, tingkat umur dan tingkat pendidikan sehingga dengan penjabaran identitas dapat mempermudah proses penelitian sekaligus tingkat pemahaman respondennya.

5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut akan digambarkan identitas responden dilihat dari perbedaan jenis kelamin sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1 Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	14	61
2.	Perempuan	9	39
Jumlah		23	100

Sumber: Data olahan, 2020

Dari tabel di atas dengan jumlah responden sebanyak 23 orang, responden terbanyak menurut jenis kelamin adalah responden laki-laki yaitu 14 orang (61 %), sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 9 orang (39%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak berjenis kelamin laki-laki.

5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia

Secara teoritis faktor usia akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Demikian pula dalam menentukan pilihan, tingkat usia memberi pengaruh. Semakin tinggi usia, maka keputusan yang akan diambil akan

semakin baik karena tingkat umur akan memberi pengaruh terhadap kematangan seseorang dalam berfikir, Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah

Tabel 5.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No.	Tingkat Usia	Jumlah Responden	Persentase(%)
1.	17-30	3	13
2.	31-40	12	52
3.	41-50	5	22
4.	51-60	3	13
Jumlah		23	100

Sumber :Data olahan,2020

Dari tabel 5.2 di atas dapat di jelaskan bahwa jumlah responden yang berusia 17-30 tahun yaitu sebanyak 3 orang (13%), usia 31-40 tahun berjumlah 12 orang (52%), Usia 41-50 tahun berjumlah 5 orang (22%) serta responden yang berusia 51-60 tahun sebanyak 3 orang (13%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak usia 31-40 tahun.

5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui tingkat pendidikan informan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase(%)
1.	SD	4	17
2.	SLTP	6	26
3.	SLTA	9	39
4.	D3	0	0
5.	S.1	4	18
6.	S.2	0	0
Jumlah		23	100

Sumber : Data olahan,2020

Pada tabel 5.3 dapat dijelaskan bahwa responden yang berpendidikan SD sebanyak 4 orang (17%), tingkat pendidikan SLTP sebanyak 6 orang (26%),

tingkat pendidikan SLTA sebanyak 9 orang (39%), tingkat pendidikan S1 sebanyak 4 orang (18%), dan tidak ada responden yang bertingkat pendidikan D3 dan S2. Tingkat pendidikan responden yang paling banyak adalah SLTA.

5.2 Hasil Penelitian

Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan oleh lembaga-lembaga pelaksana termasuk kegiatan monitoring oleh pihak-pihak yang berwenang. Implementasi dalam penelitian ini adalah implementasi pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Implementasi dalam penelitian ini terdiri dari enam indikator yaitu organisasi, interpretasi, aplikasi, komunikasi, sumber daya, disposisi. Setiap indikator terdiri dari 3 pertanyaan dan pernyataan sehingga keseluruhan dalam penelitian ini adalah 18 pertanyaan dan pernyataan berikut penjabaran dari hasil penelitian Implementasi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam penelitian ini penulis menentukan banyak kelas interval sebesar 5, rumus yang digunakan sebagai berikut :

1,00 - 1,66	= Tidak Terimplementasi
1,67 - 2,33	= Cukup Terimplementasi
2,34 - 3,00	= Terimplementasi

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pertanyaan dan pernyataan pada setiap indikator Implementasi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang dipaparkan sebagai berikut.

5.2.1 Indikator Organisasi

Organisasi adalah kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali lembaga, sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Karena itu untuk mencapai tujuan, implementor atau pemerintah harus melakukan tindakan berupa penghimpun sumber daya dan pengelolaan sumber daya tersebut.

Berikut tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dari tabel 5.4 :

Tabel 5.4 Tanggapan responden terhadap pembentukan struktur organisasi pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
	Terimplementasi	3	1	3	5
	Cukup Terimplementasi	2	8	16	40
	Tidak Terimplementasi	1	11	11	55
Jumlah			20	30	100
Rata – Rata			1.50		

Sumber: Data olahan, 2020

Dari tabel 5.4 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Terimplementasi sebanyak 1 responden (5%), menjawab Cukup Terimplementasi sebanyak 8 responden (40%), menjawab Tidak Terimplementasi sebanyak 11 responden (55%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata -rata = 1,60 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Sejauhmana Efek Dari Program termasuk pada kategori Tidak Terimplementasi yang berada pada skala 1,00 -1,66.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan dengan kepala desa, sekretaris desa, dan BPD, adapun pertanyaannya Bagaimana Pembentukan Struktur Organisasi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kuswanto Kepala Desa, Yuriko Ariando sekretaris Desa, dan Yus'adi Ketua BPD.

Sudah dilaksanakan dan terbentuk dan orang-orang yang ada pada struktur tersebut orang-orang yang di nilai mengerti mengenai kawasan Agropolitan (Kuswanto, Kepala Desa Seberang Taluk Wawancara langsung 3 Januari 2020_13.21 WIB Kantor Kepala Desa).

Pembentukan struktur organisasi pembangunan Desa Seberang Taluk sudah dilaksanakan tapi belum sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan rencana pengembangan kawasan Agropolitan, karena untuk melaksanakan pembangunan kawasan Agropolitan diperlukan struktur organisasi yang orang-orang yang betul mengerti tentang Rencana Pembangunan Pengembangan Kawasan Agropolitan tersebut (Yus'adi, BPD Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 4 Januari 2020_19.25 WIB dikediaman Yus'adi).

Struktur organisasinya sudah ada , diharapkan dengan terebtuknya struktur ini dapat tertata dengan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban program pembanguan Desa Seberang Taluk Menajdi Kawasan Agropolitan ini. (Yuriko Ariando, Sekretaris Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 3 Januari 2020_15.17 WIB Kantor Desa).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat kewenangan organisasi masih dipegang oleh kepala desa. Hal ini bahwa pembentukan struktur organisasi sudah ada, namun dalam keaggotaan belum sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan berdasarkan dari segi perencanaan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban. Dari hasil sebaran kuisioner tentang pembentukan struktur organisasi mendapatkan nilai rata-rata 1,60 yang termasuk pada kategori Tidak terimpelementasi berada pada skala 1,00-166. Struktur organisasi harus sesuai dengan kebutuhan agar program

pembangunan desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di berjalan dengan baik dan agar tercapainya suatu tujuan yang telah dibuat.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan memang sesuai dari hasil sebaran kuisioner dan wawancara tentang pembentukan struktur organisasi. Struktur organisasi memang sudah dibentuk masih perlu dibenahi karena untuk melaksanakan rencana pembangunan kawasan agropolitan sangat diutuhkan orang-orang yang mengerti tentang Agropolitan terutama masalah teknik sehingga memudahkan untuk memberi penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat.

Tabel 5.5 Tanggapan responden terhadap kewenangan organisasi dalam pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
	Terimplementasi	3	1	3	5
	Cukup Terimplementasi	2	11	22	55
	Tidak Terimplementasi	1	8	8	40
Jumlah			20	33	100
Rata – Rata			1.70		

Sumber: Data olahan, 2020

Dari tabel 5.5 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Terimplementasi sebanyak 1 responden (5%), menjawab Cukup Terimplementasi sebanyak 11 responden (55%), menjawab Tidak Terimplementasi sebanyak 8 responden (40%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata -rata = 1,70. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Sejauhmana Efek Dari Program termasuk pada kategori Cukup Terimplementasi yang berada pada skala 1,67-2,33.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan dengan kepala desa, sekretaris desa, dan BPD, adapun pertanyaannya Bagaimana Kewenangan

Organisasi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kuswanto Kepala Desa, Yuriko Ariando sekretaris Desa, dan Yus'adi Ketua BPD.

Desa memiliki wewenang untuk menjadikan kawasan Agropolitan ini, namun pelaksanaan/Implementasinya yang belum terlaksana. (Kuswanto, Kepala Desa Seberang Taluk Wawancara langsung 3 Januari 2020_13.25 WIB Kantor Kepala Desa).

Kewenangan organisasi pembangunan Desa Seberang Taluk untuk menjadi Kawasan Agropolitan tidak terlihat karena kewenangan masih dipegang oleh Kepala Desa dan struktur yang ada belum mengerti program tentang Agropolitan (Yus'adi, Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 4 Januari 2020_19.25 WIB dikediaman Yus'adi).

Kewenangan organisasi masih dipegang oleh kepala Desa melalui perangkat desa yang membidangi pembangun Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan.(Yuriko Ariando, Sekretaris Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 3 Januari 2020_15.20 WIB Kantor Desa).

Berdasarkan hasil wawancara kewenangan organisasi masih dipegang oleh kepala desa, arogansi kepala desa sangat terlihat pada pembangunan Agropolitan ini. Hal ini mengenai kewenangan organisasi dalam Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan mencakup mengumpulkan bahan, penyusun pedoman dan petunjuk teknis bagaimana program pembangunan Desa Seberang Taluk menjadi Kawasan Agropolitan serta mengomunikasikan kebijakan pemerintah desa ini kepada masyarakat. Namun Kewenangan tersebut belum berjalan secara keseluruhannya terutama dalam kewenangan petunjuk teknis program belum berperan aktif melakukannya sehingga masyarakat tidak tahu apa saja kebijakan yang dibuat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti lapangan akibat dari struktur yang bentuk belum sesuai dengan kebutuhan lapangan maka kewenangan masih

dipegang oleh kepala desa, karena kepala desa sangat menguasai rencana program kawasan Agropolitan Sesuai dengan disiplin yang dimiliki oleh struktur organisasi.

Tabel 5.6 Tanggapan responden terhadap organisasi yang ada bisa melaksanakan dalam pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
	Terimplementasi	3	2	6	10
	Cukup Terimplementasi	2	10	20	50
	Tidak Terimplementasi	1	8	8	40
Jumlah			20	34	100
Rata – Rata			1.70		

Sumber: Data Olahan, 2020

Dari tabel 5.6 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Terimplementasi sebanyak 2 responden (10%), menjawab Cukup Terimplementasi sebanyak 10 responden (50%), menjawab Tidak Terimplementasi sebanyak 8 responden (40%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata -rata = 1,70. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Sejauhmana Efek Dari Program termasuk pada kategori Cukup Terimplementasi yang berada pada skala 1,67-2,33.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan dengan kepala desa, sekretaris desa, dan BPD, adapun pertanyaannya Apakah Organisasi yang ada bisa melaksanakan Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kuswanto Kepala Desa, Yuriko Ariando sekretaris Desa, dan Yus'adi Ketua BPD.

Ya, struktur organisasi yang sudah ada dibentuk pada dasarnya mampu untuk melakukan pembangunan ini, tentu saja perlu dukungan masyarakat

mengenai pembangunan ini. (Kuswanto, Kepala Desa Seberang Taluk Wawancara langsung 3 Januari 2020_13.27 WIB Kantor Kepala Desa).

Organisasi yang suda terbentuk belum melaksanakan kegiatan pembangunan Desa untuk menjadi kawasan Agropolitan karena SDM yang ada dalam struktur organisasi belum menguasai tentang rencana pembangunan kawasan Agropolitan perlu diadakan pelatihan oleh Kepala Desa.(Yus'adi, Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 4 Januari 2020_19.27 WIB dikediaman Yus'adi).

Sebenarnya dengan struktur yang ada bisa melakukan program pembangunan desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan ini namun perlunya dukungan dari Kepala Desa dan masyarakat (Yuriko Ariando, Sekretaris Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 3 Januari 2020_15.23 WIB Kantor Desa).

Hal ini dikarenakan organisasi yang ada belum dapat melaksanakan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan dikarenakan masih adanya keanggotaan dari organisasi tersebut belum menguasai tentang rencana pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan peneliti menyimpulkan pola dasar struktur organisasi yang dibentuk sudah bisa melaksanakan kegiatan agropolitan, tapi untuk melaksanakan kegiatan tidak terlepas dari ketersediaannya fasilitas infrastruktur dan dana.

Dari tiga tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang indikator organisasi terlihat bahwa rata rata tanggapan responden berada pada kategori tidak terimpelentasi, untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator organisasi dapat dilihat pada tabel 5.7 berikut:

Tabel 5.7 Rekapitulasi Indikator Organisasi

No	Indikator Aplikasi	Kategori			Jumlah	Rata - Rata
		T	CT	TT		
1	Pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan	1	8	11	20	1.50
2	Kewenangan organisasi dalam pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan	1	8	11	20	1,70
3	Kejelasan struktur organisasi mempunyai dalam pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan	2	10	8	20	1,70
Jumlah		4	29	27	60	1.63
Jumlah Responden		1	10	9	20	
Persentase (%)		7	48	45	100	

Sumber : Data olahan, 2020

Dari tabel 5.7 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang indikator Organisasi adalah pada kategori Terimplementasi sebanyak 1 orang (7%) responden, kategori Cukup Terimplementasi sebanyak 10 orang (48%) responden, kategori Tidak Terimplementasi sebanyak 9 orang (45%) responden, Maka secara rata-rata adalah 1,63. Jika rata-rata hasil penelitian terhadap seluruh Indikator Organisasi berada pada rentang 1,00 – 1,66. Dapat disimpulkan bahwa Indikator Organisasi adalah Tidak Terimplementasi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan terkait indikator Organisasi tentang Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan belum terimplementasi karena pembentukan struktur organisasi yang belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kewenangan organisasi dalam pelaksanaan Kawasan Agropolitan masih dipegang oleh Kepala Desa melalui perangkat desa yang membidangi tentang pembangunan Desa. Struktur organisasi yang ada kurang menguasai dalam pembangunan Agropolitan dikarenakan Sumber Daya

Manusia yang terdapat dalam struktur hanya tamatan sekolah menengah. Dengan begitu itulah yang menjadi penyebab belum terimplementasinya indikator Organisasi dalam pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

5.2.2 Indikator Interpretasi

Interpretasi adalah menafsirkan agar program menjadi rencana yang konkrit dan jelas serta dapat dilaksanakan. Dalam proses implementasi, birokrat pemerintah berperan sebagai organisasi pelaksana (implementor) perlu menginterpretasikan dengan cara pandang yang sama agar program lebih operasional dan siap dilaksanakan.

Indikator interpretasi yang sama apabila telah ada kejelasan atau cara pandang yang sama, seperti kejelasan tugas, harus ada interpretasi yang sama dikalangan para implementor. Dengan demikian juga konsisten para implementor terhadap tugas yang akan dilaksanakan. Hal lain yang penting adalah para implementer harus membuat skala prioritas dalam melaksanakan tugas yang akan dilaksanakan. Dengan demikian juga, komitmen para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

Berikut tanggapan responden terhadap pernyataan dan pertanyaan tentang implementasi pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8 Tanggapan responden terhadap kejelasan tugas struktur organisasi dalam pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
	Terimplementasi	3	1	3	5
	Cukup Terimplementasi	2	9	18	45
	Tidak Terimplementasi	1	10	10	50
Jumlah			20	31	100
Rata – Rata			1.60		

Sumber: Data Olahan, 2020

Dari tabel 5.8 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Terimplementasi sebanyak 1 responden (5%), menjawab Cukup Terimplementasi sebanyak 9 responden (45%), menjawab Tidak Terimplementasi sebanyak 10 responden (50%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata -rata = 1,60. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Sejauhmana Efek Dari Program termasuk pada kategori Tidak Terimplementasi yang berada pada skala 1,00–1,66.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan dengan kepala desa, sekretaris desa, dan BPD, adapun pertanyaannya Bagaimana kejelasan tugas struktur Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kuswanto Kepala Desa, Yuriko Ariando sekretaris Desa, dan Yus'adi Ketua BPD.

Kejelasan tugas pada struktur organisasi untuk pelaksanaan pembangunan menjadi kawasan agropolitan ini sudah jelas, sudah baik, hanya perlu dukungan masyarakat untuk menjadikan desa menjadi kawasan Agropolitan. (Kuswanto, Kepala Desa Seberang Taluk Wawancara langsung 3 Januari 2020_13.29 WIB Kantor Kepala Desa).

Kejelasan tugas struktur organisasi yang sudah terbentuk dalam pembangunan desa seberang taluk menjadi kawasan agropolitan sudah jelas pembagian tugasnya masing-masing di dalam struktur supaya tidak ada tumpang tindih tugas, namun untuk pelaksanaannya perlu dilakukan bimbingan langsung oleh kepala desa. (Yus'adi, Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 4 Januari 2020_19.38 WIB dikediaman Yus'adi).

Dalam pembangunan ini sangat diperlukan yang merupakan panduan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan Desa Agropolitan ini. (Yuriko Ariando, Sekretaris Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 3 Januari 2020_15.29 WIB Kantor Desa).

Hal ini dikarenakan belum memahami tugasnya masing-masing. Organisasi bekerja berdasarkan intruksi atasan seperti Kepala Desa tanpa melihat tugas dan fungsinya sehingga banyak yang bekerja diluar dari tanggung jawab dan wewenangnya. Hal inilah yang menjadikan responden banyak yang menjawab tidak terimplementasi tentang kejelasan tugas.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan oleh peneliti mengenai kejelasan tugas tentang pelaksanaan kegiatan program Agropolitan sudah jelas, tinggal lagi menunggu kapan kegiatan ini akan dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah dibuat.

Tabel 5.9Tanggapan resonden terhadap konsistensi pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
	Terimplementasi	3	1	3	5
	Cukup Terimplementasi	2	11	22	55
	Tidak Terimplementasi	1	8	8	40
Jumlah			20	33	100
Rata – Rata			1.70		

Sumber: Data Olahan,2020

Dari tabel 5.9 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Terimplementasi sebanyak1 responden (5%), menjawab Cukup Terimplementasisebanyak11 responden (55%), menjawab Tidak Terimplementasi sebanyak 8 responden (40%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata -rata = 1,70. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Sejauhmana Efek Dari Program

termasuk pada kategori Cukup Terimplementasi yang berada pada skala 1,67–2,33.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan dengan kepala desa, sekretaris desa, dan BPD, adapun pertanyaannya bagaimana konsistensi pelaksanaan Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kuswanto Kepala Desa, Yuriko Ariando sekretaris Desa, dan Yus'adi Ketua BPD.

Kami melaksanakan pembangunan desa ini sebaik mungkin dan konsisten, hanya saja dikarenakan jalan yang harusnya dibangun di Dusun Tuo ataupun Rimbo Rawang sebagai akses kawasan agropolitan dipindahkan ke Sungai Soriak. Jadinya, rencana yang awalnya sudah disepakatai jadi gagal terlaksana. (Kuswanto, Kepala Desa Seberang Taluk Wawancara langsung 3 Januari 2020_13.33 WIB Kantor Kepala Desa).

Konsistensi pelaksanaan pembangunan desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan cukup konsisten sesuai dengan program-program yang ada dan telah melakukan kegiatan sosial tentang perencanaan yang telah dibuat. (Yus'adi, Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 4 Januari 2020_19.38 WIB dikediaman Yus'adi)

Konsistensi sudah terlihat, walaupun persentasinya tidak begitu signifikan akan tetapi arah pembangunan sudah menuju menjadi kawasan Agropolitan. (Yuriko Ariando, Sekretaris Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 3 Januari 2020_15.32 WIB Kantor Desa).

Konsistensi pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan tersebut cukup terimplementasi. Kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pengkoordinasikan perumusan kebijakan pembanguna desa Seberang Taluk menjadi Kawasan Agropolitan telah dilakukan namun tidak sepenuhnya dilakukan hal tersebut. Sedangkan untuk kegiatan penyiapan bahan penyusunan pedoman pembanguna desa Seberang Taluk kurang konsisten. Seperti dalam penyiapan bahan pembinaan administrasi, infrastruktur.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan kalau fasilitas penunjang dilapangan sudah tersedia, Kepala Desa bersama struktur organisasi konsisten untuk melaksanakan kegiatan program Kawasan Agropolitan. Tapi karena rencana pembangunan insfrastruktur jalan Rimbo Rawang sebagai akses Kawasan Agropolitan yang akan dibangun melalui dana APBD Kuantan Singingi dipindahkan ke lokasi sungai soriak, tentu mengakibatkan pelaksanaan kegiatan program kawasan Agropolitan terkendala.

Tabel 5.10 Tanggapan resonden terhadap skala prioritas dan komitmen pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
	Terimplementasi	3	0	0	0
	Cukup Terimplementasi	2	14	28	70
	Tidak Terimplementasi	1	6	6	30
Jumlah			20	34	100
Rata – Rata			1.70		

Sumber: Data olahan, 2020

Dari tabel 5.10 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Terimplementasi sebanyak 0 responden (0%), menjawab Cukup Terimplementasi sebanyak 14 responden (70%), menjawab Tidak Terimplementasi sebanyak 6 responden (30%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata -rata = 1,70. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Sejauhmana Efek Dari Program termasuk pada kategori Cukup Terimplementasi yang berada pada skala 1,67–2,33.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan dengan kepala desa, sekretaris desa, dan BPD, adapun pertanyaannya bagaimana skala prioritas dan komitmen pelaksanaan Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan

Agropolitan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kuswanto Kepala Desa, Yuriko Ariando sekretaris Desa, dan Yus'adi Ketua BPD.

Pada awalnya kami sangat yakin dan berkomitmen penuh untuk Pembangunan menjadi Kawasan Agropolitan ini, namun Infrastruktur jalan menuju kawasan agropolitan ini yang semula akan diaspal malah jalan di "Ulak" yang diaspal, sehingga belum terimplementasi menjadi Kawasan Agropolitan (Kuswanto, Kepala Desa Seberang Taluk Wawancara langsung 3 Januari 2020_13.39 WIB Kantor Kepala Desa).

Skala prioritas pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan yaitu infrastruktur aspal jalan menuju kawasan Agropolitan di Rimbo Rawang, namun pada kenyataannya jalan yang diaspal di Sungai Soriak dengan begitu program Agropolitan akan tertunda. (Yus'adi, Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 4 Januari 2020_19.340 WIB dikediaman Yus'adi).

Saat ini skala prioritas pembangunan ini tentu saja sarana dan prasarana namun kenyataannya dalam perencanaan jalan Rimbo Rawang yang akan diaspal dialihkan ke Sungai Soriak. (Yuriko Ariando, Sekretaris Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 3 Januari 2020_15.37 WIB Kantor Desa).

Dalam pelaksanaan pembangunan desa Seberang taluk Menjadi Kawasan Agropolitan dikategorikan belum terimplementasi meskipun sebelum seluruhnya menjadi skala prioritas pembangunan desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan agropolitan dikarenakan tugas yang harus diprioritaskan belum tersusun seperti pelaksanaan infrastruktur jalan yang diaspal di Rimbo Rawang namun dialihkan ke Sungai Soriak. Desa Seberang Taluk telah berkomitmen menjadikan pembangunan Desa Seberang Taluk menjadi kawasan Agropolitan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti lapangan program yang direncanakan oleh kepala Desa merupakan skala prioritas Desa Seberang Taluk menjadikan Kawasan Agropolitan, namun komitmen pemerintah Kabupaten yang sudah di

sepakati dengan desa berubah sehingga yang telah diajukan oleh pemerintah desa batal dilaksanakan.

Dari tiga tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang interpretasi terlihat bahwa rata rata tanggapan responden berada pada kategori belum terimplementasi, untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator interpretasi dapat dilihat pada tabel 5.11 berikut:

Tabel 5.11 Rekapitulasi Indikator Interpretasi

No	Indikator Interpretasi	Kategori			Jumlah	Rata - Rata
		T	CT	TT		
1	Konsistensi pelaksanaan tugas pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan	1	9	10	20	1.60
2	Skala prioritas pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan	1	11	8	20	1.70
3	Komitmen pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan	0	14	6	20	1.70
Jumlah		2	34	24	60	1.70
Jumlah Responden		1	11	8	20	
Persentase (%)		3	57	40	100	

Sumber: Data olahan, 2020

Dari tabel 5.11 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang indikator Interpretasi adalah pada kategori Terimplementasi sebanyak 1 orang (3%) responden, kategori Cukup Terimplementasi sebanyak 11 orang (57%) responden, kategori Tidak Terimplementasi sebanyak 8 orang (40%) responden, Maka secara rata-rata adalah 1,70. Jika rata-rata hasil penelitian

terhadap seluruh Indikator Aplikasi berada pada rentang 1,67 – 2,33. Dapat disimpulkan bahwa Indikator Interpretasi adalah Cukup Terimplementasi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan terkait Indikator Interpretasi tentang Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan belum terimplementasi karena kejelasan tugas dari struktur organisasi cukup jelas namun diperlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Perlu adanya panduan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Agropolitan. Konsistensi dan skala prioritas pelaksanaan pembangunan Kawasan Agropolitan sudah jelas namun pada kenyataannya di lapangan yang direncanakan untuk pembangunan infrastruktur akses jalan menuju Kawasan Agropolitan yaitu pengaspalan jalan Rimbo Rawang namun di alihkan ke jalan Sungai Soriak. Jalan Sungai Soriak merupakan batas anatar Desa Seberang Taluk dengan Seberang Taluk Hilir sehingga harus diusulkan oleh kedua Kepala Desa, Di duga pemindahan pengaspalan jalan itu syarat dan kepentingan satu pihak. Hal inilah penyebab saat ini pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan tertunda.

5.2.3 Indikator Aplikasi

Melalui aplikasi ini diharapkan akan muncul dari kelompok sasaran (target). Tegasnya, dengan aplikasi kebijakan akan dapat diketahui apakah lingkungan menerima atau menolak implemtasi dan hasil kebijakan tersebut. Karena itu, mengaplikasikan kebijakan bukanlah hal yang mudah, bahkan bias menimbulkan tantangan yang harus dihadapi implementor. Sesungguhnya suatu kebijakan public apabila ingin berhasil dilaksanakan, maka kebijakan tersebut

perlu dilakukan atau dirumuskan kembali untuk mendapatkan masukan. Indikator aplikasi dijabarkan dalam tiga item penelitian yaitu penerapan, pelaksanaan, dan penilaian.

Berikut tanggapan responden terhadap pernyataan dan pertanyaan tentang implemetasi pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi kawasan Agropolitan diKecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.12 Tanggapan responden terhadap penerapan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
	Terimplementasi	3	1	3	5
	Cukup Terimplementasi	2	11	22	55
	Tidak Terimplementasi	1	8	8	40
Jumlah			20	33	100
Rata – Rata			1.70		

Sumber: Data olahan,2020

Dari tabel 5.12 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Terimplementasi sebanyak1 responden (5%), menjawab Cukup Terimplementasisebanyak11 responden (55%), menjawab Tidak Terimplementasi sebanyak 8 responden (40%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata -rata = 1,70. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Sejauhmana Efek Dari Program termasuk pada kategori Cukup Terimplementasi yang berada pada skala 1,67–2,33.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan dengan kepala desa, sekretaris desa, dan BPD, adapun pertanyaannya bagaimana penerapan pelaksanaan Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kuswanto Kepala Desa, Yuriko Ariando sekretaris Desa, dan Yus'adi Ketua BPD.

Belum terimplementasi, karena yang terpenting itu infrastruktur jalan menuju kawasan Agropolitan tersebut, karena jalan di aspal malah ketempat lain, sementara program ini tidak terlaksana, tidak tau kalau kepala desa selanjutnya melaksanakan atau tidak. (Kuswanto, Kepala Desa Seberang Taluk Wawancara langsung 3 Januari 2020_13.42 WIB Kantor Kepala Desa).

Untuk penerapan pembangunan Agropolitan belum bisa dilaksanakan karena masih banyak yang perlu dipersiapkan seperti fasilitas dan infrastruktur untuk menunjang terlaksananya program tersebut serta masyarakat belum mengerti tentang manfaat dari program yang telah dicanangkan oleh pemerintah desa. (Yus'adi, Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 4 Januari 2020_19.42 WIB dikediaman Yus'adi).

Belum dapat terlihat penerapan dari pembangunan ini. Banyak hal yang harus dipersiapkan untuk tahap awal ini seperti infrastruktur dan fasilitas lainnya. (Yuriko Ariando, Sekretaris Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 3 Januari 2020_15.39 WIB Kantor Desa).

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan untuk penerapan pembangunan Kawasan Agropolitan tidak cukup dengan dukungan dari masyarakat saja tapi harus adanya persiapan yang matang karena membangun Kawasan Agropolitan tidak seperti membalikkan telapak tangan.

Tabel 5.13 Tanggapan responden terhadap pencapaian pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
	Terimplementasi	3	1	3	5
	CukupTerimplementasi	2	8	16	40
	Tidak Terimplementasi	1	11	11	55
Jumlah			20	30	100
Rata – Rata			1.50		

Sumber: Data olahan,2020

Dari tabel 5.13 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Terimplementasi sebanyak 1 responden (5%), menjawab Cukup Terimplementasi sebanyak 8 responden (40%), menjawab Tidak Terimplementasi sebanyak 11 responden (55%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata -rata = 1,50. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Sejauhmana Efek Dari Program termasuk pada kategori Tidak Terimplementasi yang berada pada skala 1,00–1,66.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan dengan kepala desa, sekretaris desa, dan BPD, adapun pertanyaannya bagaimana pencapaian Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kuswanto Kepala Desa, Yuriko Ariando sekretaris Desa, dan Yus'adi Ketua BPD.

Persetujuan menjadikan Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan ini sudah ada dan sudah direncanakan juga, namun sebagian masyarakat tidak memahami ini meski sudah sosialisasikan, oleh sebab itu pembangunan akses jalan yang harusnya menuju kawasan Agropolitan ini gagal terlaksana dan dipindahkan kejalan “ulak”.(Kuswanto, Kepala Desa Seberang Taluk Wawancara langsung 3 Januari 2020_13.46 WIB Kantor Kepala Desa).

Pencapaian pembangunan Agropolitan ini belum terlihat karena keberhasilan pengembangan kawasan Agropolitan ini juga sangat ditentukan oleh dukungan dan respon positif dari masyarakat rencana ini masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat. Walaupun begitu SK dan master plannya sudah ada. (Yus'adi, Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 4 Januari 2020_19.45 WIB dikediaman Yus'adi).

Pencapaian pembangunan desa Seberang Taluk menjadi kawasan Agropolitan ini belum begitu terlihat bahkan bisa dikatakan belum ada seperti contohnya yang jalan Rimbo rawang seharusnya diaspal namun dialihkan ke jalan Sungai Soriak. (Yuriko Ariando, Sekretaris Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 3 Januari 2020_15.42 WIB Kantor Desa).

Tidak terimplementasinya pencapaian pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan dikarenakan tidak mendapatkan respon positif dari masyarakat. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada peran pemerintah dan masyarakat. Keduanya harus menciptakan sinergi sehingga pembangunan mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan hasil observasi lapangan pencapaian pembangunan Desa Seberang Taluk menjadi Kawasan Agropolitan belum terlihat lapangan terumatasecara fisik belum ada pembangunan yang dilaksanakan untuk menunjang terlaksananya kegiatan pelaksanaan kegiatan program Kawasan Agropolita belum dapat dinilai secara fisik.

Tabel 5.14 Tanggapan responden terhadap penilaian tahap demi tahap pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
	Terimplementasi	3	0	0	0
	Cukup Terimplementasi	2	11	22	55
	Tidak Terimplementasi	1	9	9	45
Jumlah			20	31	100
Rata – Rata			1,60		

Sumber: Data Olahan, 2020

Dari tabel 5.14 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Terimplementasi sebanyak 0 responden (0%), menjawab Cukup Terimplementasi sebanyak 11 responden (55%), menjawab Tidak Terimplementasi sebanyak 9 responden (45%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata -rata = 1,60. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Sejauhmana Efek Dari Program termasuk pada kategori Tidak Terimplementasi yang berada pada skala 1,00–1,66.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan dengan kepala desa, sekretaris desa, dan BPD, adapun pertanyaannya bagaimana penilaian tahap demi tahap Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kuswanto Kepala Desa, Yuriko Ariando sekretaris Desa, dan Yus'adi Ketua BPD.

Kendalanya meyakinkan masyarakat untuk tahap awal, tahap perencanaan sudah baik, bahkan kami sudah memiliki master plan. Dimulai dengan pembangunan jalan menuju lokasi namun itu menjadi pro dan kontra masyarakat. (Kuswanto, Kepala Desa Seberang Taluk Wawancara langsung 3 Januari 2020_13.48 WIB Kantor Kepala Desa).

Ada kendala meyakinkan masyarakat karena kawasan agropolitan dampaknya baru akan terasa jangka panjang sementara masyarakat sebagian besar maunya cepat/instan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa Seberang Taluk ini diperlukan penilaian tahap demi tahap sehingga mengetahui sejauh mana realisasi pelaksanaan program ini sudah dilaksanakan. (Yus'adi, Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 4 Januari 2020_19.47 WIB dikediaman Yus'adi).

Tahap demi tahap pelaksanaan pembanguana Desa Seberang Taluk tidak terlihat dan tertata dikarenakan susah untuk meyakinkan masyarakat pada tahap pembangunan ini (Yuriko Ariando, Sekretaris Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 3 Januari 2020_15.49 WIB Kantor Desa).

Hal ini dikarenakan kurang yakinnya masyarakat terhadap pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan masyarakat menginginkan pembangunan itu cepat ataupun instan, ini perlu dianya evaluasi untuk mengatasi masalah ini serta untuk proses pengambilan kebijakan lagi.

Dari tiga tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang Aplikasi terlihat bahwa rata rata tanggapan responden berada pada kategori tidak terimpelentasi, untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Aplikasi dapat dilihat pada tabel 5.15 berikut:

Tabel 5.15 Rekapitulasi Indikator Aplikasi

No	Indikator Aplikasi	Kategori			Jumlah	Rata - Rata
		T	CT	TT		
1	Penerapan tugas dan fungsi dari struktur organisasi dalam Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan	1	11	8	20	1,70
2	Penilaian tentang pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan	1	8	11	20	1,50
3	Pencapaian pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan	0	11	9	20	1,60
Jumlah		2	30	28	60	1.60
Jumlah Responden		1	10	9	20	
Persentase (%)		3	50	47	100	

Sumber: Data olahan, 2020

Dari tabel 5.15 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang indikator Aplikasi adalah pada kategori Terimplementasi sebanyak 1 orang (3%) responden, kategori Cukup Terimplementasi sebanyak 10 orang (50%) responden, kategori Tidak Terimplemnetasisebanyak 9 orang (47%) responden, Maka secara rata-rata adalah 1,60. Jika rata-rata hasil penelitian terhadap seluruh Indikator Aplikasi berada pada rentang 1,00 – 1,66. Dapat disimpulkan bahwa Indikator Aplikasi adalah Tidak Terimplementasi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan terkait dengan Indikator Aplikasi tentang Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan memang tidak terimplemetasi . Peneliti memandang penerapan pembangunan Kawasan Agropolitan untuk tahap awal adalah pembukaan akses jalan menuju kawasan Agropolitan namun jalan Rimbo Rawang yang seharusnya diaspal alihkan ke jalan Sungai Soriak tanpa ada keterangan yang jelas oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Pencapaian dalam pembangunan

Kawasan Agropolitan belum terlihat karena perlunya dukunganyang bersifat positif dari masyarakat sehingga pembangunan Kawasan Agropolitan untuk tahap awalnini terlaksana. Secara fisik pembangunan Kawasan Agropolitan juga belum terlihat dikarenakan tertundanya program pembangunan Kawasan Agropolitan akibat peralihan pengaspalan jalan. Masyarakat sangat kecewa dengan pemindahan jalan yang tidak pernah diusulkan melalui Musrembang tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

5.2.4 Indikator Komunikasi

Melalui komunikasi diharapkan keberhasilan implemntasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran , sehingga mengurangi distorsi implemtasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapain tujuan dari implemtasi kebijakan public.

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus transmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komukasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implemtor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Berikut tanggapan responden terhadap pernyataan dan pertanyaan tentang implemetasi pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi kawasan Agropolitan di

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.16 Tanggapan responden terhadap sosialisasi pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
	Terimplementasi	3	4	12	20
	Cukup Terimplementasi	2	7	14	35
	Tidak Terimplementasi	1	9	9	45
Jumlah			20	35	100
Rata – Rata			1,80		

Sumber: Data olahan, 2020

Dari tabel 5.16 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Terimplementasi sebanyak 4 responden (20%), menjawab Cukup Terimplementasi sebanyak 7 responden (35%), menjawab Tidak Terimplementasi sebanyak 9 responden (45%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata -rata = 1,80. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Sejauhmana Efek Dari Program termasuk pada kategori Cukup Terimplementasi yang berada pada skala 1,67–2,33.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan dengan kepala desa, sekretaris desa, dan BPD, adapun pertanyaannya apakah pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kuswanto Kepala Desa, Yuriko Ariando sekretaris Desa, dan Yus'adi Ketua BPD.

Pernah dan sering sekali, kami beserta jajaran dan BPD memeberikan informasi sosialisasi mengenai pembangunan KAwasan Agropolitan ini, dan selalu terbuka jika ada yg ingin ditanyakan. (Kuswanto, Kepala Desa Seberang Taluk Wawancara langsung 3 Januari 2020_13.51 WIB Kantor Kepala Desa).

Pernah, Kepala Desa bersama perangkat desa serta BPD selalu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang rencana program pembangunan desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan.(Yus'adi, Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 4 Januari 2020_20.05 WIB dikediaman Yus'adi).

Sosialisasi terus dilaksanakan seperti setiap diadakan pertemuan antara masyarakat dan perangkat desa, sosialisasi ini sesuai dengan visi dan misi desa Seberang Taluk salah satunya menjadikan desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan.(Yuriko Ariando, Sekretaris Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 3 Januari 2020_15.50 WIB Kantor Desa).

Dari hasil wawancara tentang sosialisasi sudah pernah dilakukan oleh aparat desa maupun oleh organisasi Agropolitan setiap pertemuan masyarakat dipersilahkan untuk bertanya jawab secara langsung. Komunikasi dalam sosialisasi pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan sangat perlu dilakukan. Penyaluran sosialisasi yang baik terhadap program pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan tentu akan mendapatkan hasil implementasi yang baik juga. Miskomunikasi dengan masyarakat sangat berpengaruh dalam penyaluran komunikasi sehingga sosialisasi pembangunan Desa Seberang Taluk menjadi kawasan Agropolitan tidak terduga distorsi ditengah jalan.

Dari hasil sebaran kuisioner tentang melakukan sosialisasi kepada masyarakat di hasilkan rata-rata 1,80. Dari nilai rata-rata ini menunjukkan pada kategori cukup terimplementasi yang berapa pada skala 1,67-2,33. Berdasarkan observasi penulis lapangan tentang pelaksanaan sosialisasi pembangunan Desa Seberang Taluk menjadi kawasan Agropolitan memang belum terimplementasi, karena pelaksanaan sosialisasi diharapkan tidak membingungkan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan pemerintah desa telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang program pembangunan Kawasan Agropolitan tapi belum efektif karena sosialisasi dilaksanakan pada pertemuan secara umum dengan masyarakat tidak adanya sosialisasi secara khusus untuk program pembangunan desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan.

Tabel 5.17 Tanggapan responden terhadap metode yang digunakan dalam sosialisasi pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
	Terimplementasi	3	2	6	10
	Cukup Terimplementasi	2	10	20	50
	Tidak Terimplementasi	1	8	8	40
Jumlah			20	34	100
Rata – Rata			1,70		

Sumber: Data olahan, 2020

Dari tabel 5.17 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Terimplementasi sebanyak 2 responden (10%), menjawab Cukup Terimplementasi sebanyak 10 responden (50%), menjawab Tidak Terimplementasi sebanyak 8 responden (40%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata -rata = 1,70. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Sejauhmana Efek Dari Program termasuk pada kategori Cukup Terimplementasi yang berada pada skala 1,67–2,33.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan dengan kepala desa, sekretaris desa, dan BPD, adapun pertanyaannya metode apa yang digunakan dalam sosialisasi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kuswanto Kepala Desa, Yuriko Ariando sekretaris Desa, dan Yus'adi Ketua BPD.

Disaat rapat juga disaat pertemuan-pertemuan serta saat musyawarah masyarakat dipersilahkan tanya jawab langsung dengan saya mengenai Kawasan Agropolitan ini. (Kuswanto, Kepala Desa Seberang Taluk Wawancara langsung 3 Januari 2020_13.55 WIB Kantor Kepala Desa).

Metode yang digunakan dalam mensosialisasikan pembangunan Agropolitan ini dengan metode ceramah, penyampaian langsung serta tanya jawab dimana Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat setiap diadakan musyawarah tentang program yang direncanakan oleh desa.(Yus'adi, Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 4 Januari 2020_20.15 WIB dikediaman Yus'adi)

Metode yang dilakukan dalam sosialisasi yaitu dengan musyawarah, papan pengumuman serta personal to personal. (Yuriko Ariando, Sekretaris Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 3 Januari 2020_15.53 WIB Kantor Desa).

Dari hasil wawancara tentang metode yang digunakan dalam sosialisasi pembangunan Desa Seberang Taluk menjadi Kawasan Agropolitan metode yang digunakan yaitu dengan pertemuan-pertemuan langsung dengan masyarakat. Metode selanjutnya yang digunakan merupakan metode musyawarah dan melalui papan pengumuman atau baliho serta metode *personal to personal*. Dalam pertemuan masyarakat dipersilahkan untuk tanya jawab antara masyarakat dan aparatur desa mengenai pembangua Desa Seberang Taluk menjadi Kawasan Agropolitan.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan tentang metode yang digunakan dalam sosialisasi kepada msyarakat memang belum terimplementasi. Dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui program ini meskipun telah berbagai metode dilakukan. Hal ini perlu diperhatikan lagi oleh aparatur desa agar masyarakat merespon dan ikut berpartisipasi pada program pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ada. Metode yang digunakan dalam sosialisasi perlu dirubah

yaitu memperkecil ruang lingkup sosialisasi seperti kelompok kelompok tani atau sosialisasi perdesun khusus membahas tentang Agropolitan.

Tabel 5.18 Tanggapan responden intensitas komunikasi aparat desa dalam pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
	Terimplementasi	3	0	0	0
	Cukup Terimplementasi	2	8	16	40
	Tidak Terimplementasi	1	12	12	60
Jumlah			20	28	100
Rata – Rata			1,40		

Sumber: Data olahan, 2020

Dari tabel 5.18 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Terimplementasi sebanyak 0 responden (0%), menjawab Cukup Terimplementasi sebanyak 8 responden (40%), menjawab Tidak Terimplementasi sebanyak 12 responden (60%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata -rata = 1,40. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Sejauhmana Efek Dari Program termasuk pada kategori Tidak Terimplementasi yang berada pada skala 1,00–1,66.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan dengan kepala desa, sekretaris desa, dan BPD, adapun pertanyaannya bagaimana intensitas komunikasi apatur pemerintah desa dalam Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kuswanto Kepala Desa, Yuriko Ariando sekretaris Desa, dan Yus'adi Ketua BPD.

Saya rasa cukup intens, melalui pertemuan-pertemuan kami selalu membicarakan mengenai Kawasan Agropolitan ini. (Kuswanto, Kepala Desa Seberang Taluk Wawancara langsung 3 Januari 2020_14.00 WIB Kantor Kepala Desa).

Tidak intensnya komunikasi aparat pemerintah desa dengan masyarakat sehingga perlu ditingkatkan lagi supaya masyarakat benar-benar paham

akan tujuan dan manfaat tentang pembangunan desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan.(Yus'adi, Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 4 Januari 2020_20.19 WIB dikediaman Yus'adi)

Perlu lebih intens lagi karena masyarakat merupakan pelaku utama dalam rangka mewujudkan kawasan Agropolitan(Yuriko Ariando, Sekretaris Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 3 Januari 2020_15.55 WIB Kantor Desa).

Dari hasil wawancara tentang intensitas komunikasi aparatur desa dengan masyarakat mengenai program pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan ini perlu ditingkatkan lagi. Komunikasi interpersonal yang dilakukan berupa penyampaian atau bertatap muka langsung dengan masyarakat. Kualitas komunikasi aparatur pemerintah sangat penting dalam mensosialisasikan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dari sebaran kuisioner tentang intensitas komunikasi aparatur pemerintah desa dengan masyarakat dihasilkan rata-rata 1,40. Dari nilai rata-rata ini menunjukkan pada tidak terimplementasi yang berada pada skala 1,00-1,66.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan tentang intensitas masyarakat memang belum terimplementasi dikarenakan masyarakat merupakan peran utama dalam pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan. Perlunya ditingkatkan intensitas untuk mensosialisasikan program pembanguana Kawasan Agropolitan perlu di tingkat sehingga tahap penerapan dari masyarakat terhadap program dapat dipahami serta di mengerti dengan baik.

Dari tiga tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang Aplikasi terlihat bahwa rata rata tanggapan responden berada pada kategori tidak terimpelentasi,

untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Aplikasi dapat dilihat pada tabel 5.15 berikut:

Tabel 5.19 Rekapitulasi Indikator Komunikasi

No	Indikator Aplikasi	Kategori			Jumlah	Rata - Rata
		T	CT	TT		
1	Sosialisasi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan	4	7	9	20	1,80
2	Metode yang digunakan dalam sosialisasi pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan	2	8	10	20	1,70
3	Intensitas komunikasi paratur desa dengan masyarakat (petani) pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan	0	8	12	20	1,40
Jumlah		6	25	29	60	1.63
Jumlah Responden		2	8	10	20	
Persentase (%)		10	42	48	100	

Sumber: Data olahan, 2020

Dari tabel 5.19 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang indikator Komunikasi adalah pada kategori Terimplementasi sebanyak 6 orang (2%) responden, kategori Cukup Terimplementasi sebanyak 8 orang (42%) responden, kategori Tidak Terimplemnetasisebanyak 10 orang (48%) responden, Maka secara rata-rata adalah 1,63. Jika rata-rata hasil penelitian terhadap seluruh Indikator Komunikasi berada pada rentang 1,00 – 1,66. Dapat disimpulkan bahwa Indikator Komunikasi adalah Tidak Terimplementasi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan terkait Indikator Komunikasi tentang pembangunan desa Sebeang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan tidak terimplementasi. Sosialiasi sudah sering kali di lakukan oleh aparatur desa dan organisasi terkait seperti diadakannya pertemuan dan musyawarah dengan masyarakat langsung serta bertanya jawab secara langsung

tentang Pembangunan Desa Seberang Taluk serta metode yang digunakan dalam sosialisasi yaitu adanya baliho serta tanya jawab langsung namun masih banyak masyarakat terutama petani yang tidak mengerti akan program pembangunan Kawasan Agropolitan perlunya komunikasi secara intens antara masyarakat petani khususnya dengan aparat desa dan organisasi pembangunan Kawasan Agropolitan.

5.2.5 Indikator Sumber Daya

Dimana isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementer kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implemtor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Berikut tanggapan responden terhadap pernyataan dan pertanyaan tentang implemetasi pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.20 Tanggapan responden terhadap kemampuan aparat desa dalam sosialisasi pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
	Terimplementasi	3	4	12	20
	Cukup Terimplementasi	2	9	18	45
	Tidak Terimplementasi	1	7	7	35
Jumlah			20	37	100
Rata - Rata			1,90		

Sumber: Data olahan, 2020

Dari tabel 5.20 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Terimplementasi sebanyak 4 responden (20%), menjawab Cukup Terimplementasi sebanyak 9 responden (45%), menjawab Tidak Terimplementasi sebanyak 7 responden (35%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata -rata = 1,90. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Sejauhmana Efek Dari Program termasuk pada kategori Cukup Terimplementasi yang berada pada skala 1,67–2,33.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan dengan kepala desa, sekretaris desa, dan BPD, adapun pertanyaannya bagaimana kemampuan birokrat dalam mensosialisasikan kebijakan Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kuswanto Kepala Desa, Yuriko Ariando sekretaris Desa, dan Yus'adi Ketua BPD.

Sudah baik, kami mengsosialisasikan ini tidak dalam bentuk waktu yang singkat dan kami sudah merencanakan ini, kami rasa cukup baik kemampuan kami dalam memberikan sosialisasi. (Kuswanto, Kepala Desa Seberang Taluk Wawancara langsung 3 Januari 2020_14.08 WIB Kantor Kepala Desa).

Kemampuan birokrat dalam melakukan sosialisasi kebijakan ini cukup baik karena para birokrat cukup menguasai serta ilmu yang di miliki oleh kepala desa sesuai dengan pembangunan desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan. (Yus'adi, Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 4 Januari 2020_20.23 WIB dikediaman Yus'adi).

Sudah cukup baik, kemampuan birokrat dalam mensosialisasikan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh birokrat terutama oleh struktru organisasi. (Yuriko Ariando, Sekretaris Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 3 Januari 2020_15.57 WIB Kantor Desa).

Berdasarkan hasil wawancara tentang kemapuan birokrat dalam mensosialisasikan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan sudah cukup baik karena birokrat mensosialisasikan pembangunan

Kawasan Agropolitan sudah sesuai dengan kompetensi ataupun kemampuannya masing-masing. Birokrat desa telah melakukan sosialisasi terkait kawasan agropolitan sudah cukup lama dilakukan.

Dari hasil sebaran kuisioner mengenai kemampuan birokrat dalam mensosialisasikan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan dapat dihasilkan rata-rata 1.90. dari nilai rata-rata ini menunjukkan pada kategori Cukup terimplementasi yang berada pada skala 1,67-2,33. Kemampuan birokrat dalam mensosialisasikan hanya sebatas sebatas artian saja. Kedangkalan pemahaman masyarakat tentang pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan diperlukannya pemberian pemahaman dari birokrat serta manfaat dari program pembanguan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan kemampuan birokrasi dalam mensosialisasikan program pembangunan kawasan Agropolitan tidak ragukan terutama Kepala Desa yang sangat menguasai karena Kepala Desa memiliki disiplin ilmu yang berkaitan erat dengan program.

Tabel 5.21 Tanggapan responden terhadap tingkat pendidikan aparatur desa dalam pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
	Terimplementasi	3	3	9	15
	Cukup Terimplementasi	2	5	10	25
	Tidak Terimplementasi	1	12	12	60
Jumlah			20	31	100
Rata - Rata			1,60		

Sumber: Data olahan, 2020

Dari tabel 5.21 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Terimplementasi sebanyak 3 responden (15%), menjawab Cukup Terimplementasi sebanyak 5 responden (25%), menjawab Tidak Terimplementasi sebanyak 12 responden (60%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata = 1,60. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Sejauhmana Efek Dari Program termasuk pada kategori Tidak Terimplementasi yang berada pada skala 1,00–1,66.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan dengan kepala desa, sekretaris desa, dan BPD, adapun pertanyaannya bagaimana tingkat pendidikan struktur organisasi diperlukan dalam Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kuswanto Kepala Desa, Yuriko Ariando sekretaris Desa, dan Yus'adi Ketua BPD.

Berbicara tingkat pendidikan memang ada pada struktur organisasi yang tamatan sekolah menengah namun itu tidak menjadi patokan kemampuan seseorang, orang-orang pada struktur organisasi sudah cukup baik untuk melaksanakan program ini. (Kuswanto, Kepala Desa Seberang Taluk Wawancara langsung 3 Januari 2020_14.11 WIB Kantor Kepala Desa).

Untuk melaksanakan pembanguna desa Seberang Taluk menjadi Kawasan Agropolitan ini sangat diperlukan orang-orang yang mempunyai pendidikan dan pengalaman kegiatan namun pada kenyataannya masih banyak adanya orang yang berada dalam struktur organisasi yang tamat sekolah menengah dan kurang pengalaman. (Yus'adi, Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 4 Januari 2020_20.27 WIB dikediaman Yus'adi).

Tingkat pendidikan sangat diperlukan dalam menjalankan pembangunan desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan ini pada struktur organisasi yang da tingkat pendidikannya tamatan sekolah menengah namun pengalaman yang lebih dibutuhkan (Yuriko Ariando, Sekretaris Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 3 Januari 2020_16.00 WIB Kantor Desa).

Berdasarkan hasil wawancara tentang tingkat pendidikan struktur organisasi diperlukan dalam pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan . aparat desa dan organisasi yang ada kebanyakan tamatan sekolah menengah atas. Meskipun begitu tamatan sekolah menengah atas tidak dapat dijadikan patokan kemampuan seseorang. Pengalaman juga sangat berpengaruh pada kemampuan seseorang tidak hanya dapat dilihat dari pendidikan formal.

Hasil kuisioner mengenai tingkat pendidikan struktur organisasi dalam pembangunan desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan dapat dihasilkan rata-rata 1,60. Dari nilai rata-rata ini menunjukkan pada kategori tidak terimplementasi yang berada pada skala 1,00-1.66.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan meskipun terdapat tamatan sekolah menengah atas namun ad juga yang hanya tamatan sekolah dasar sehingga bekerja hanya menunggu perintah tanpa adanya inisiatif dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan tentang Agropolitan sedangkan dilapangan diperlukan tenaga teknis sesuai dengan Pembangunan Desa Seberang taluk Menjadi Kawasan Agropolitan.

Tabel 5.22 Tanggapan responden terhadap ketersediaan dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
	Terimplementasi	3	2	6	10
	Cukup Terimplementasi	2	7	14	35
	Tidak Terimplementasi	1	11	11	55
Jumlah			20	31	100
Rata - Rata			1,60		

Sumber: Data Olahan, 2020

Dari tabel 5.22 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Terimplementasi sebanyak 2 responden (10%), menjawab Cukup Terimplementasi sebanyak 7 responden (35%), menjawab Tidak Terimplementasi sebanyak 11 responden (55%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata -rata = 1,60. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Sejauhmana Efek Dari Program termasuk pada kategori Tidak Terimplementasi yang berada pada skala 1,00–1,66.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan dengan kepala desa, sekretaris desa, dan BPD, adapun pertanyaannya bagaimana ketersediaan dana yang dialokasikan dalam Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kuswanto Kepala Desa, Yuriko Ariando sekretaris Desa, dan Yus'adi Ketua BPD.

Program pembangunan desa ini tentu tidak akan terlaksana hanya dengan dana desa saja, kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat untuk pembangunan desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan (Kuswanto, Kepala Desa Seberang Taluk Wawancara langsung 3 Januari 2020_14.22 WIB Kantor Kepala Desa).

Program-program pembanguana desa Seberang Taluk tidak berjalan hanya mengandalkan dana dari pemerintah desas saja, perlu adanya dukungan dari instansi pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat bahkan kementerian. (Yus'adi, Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 4 Januari 2018_20.28 WIB dikediaman Yus'adi).

Ketersediaan dana dalam pembangunan ini diperlukan dukungan dari pemeerintah daerah karena dasa desa tidak bisa menjalankan pembanguan Kawasan Agropolitan secara keseluruhan. (Yuriko Ariando, Sekretaris Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 3 Januari 2020_16.03 WIB Kantor Desa).

Dari hasil wawancara mengenai ketersediaan dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan

ini tidak akan terlaksana jika hanya mengandalkan dana desa saja diperlukan dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahkan kementerian terkait. Seperti yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk pengaspalan jalan sebesar Rp 90.000.000,-. Jalan menuju kawasan Agropolitan di Rimbo Rawang namun pada kenyataannya dipindahkan ke jalan Sungai Soriak.

Berdasarkan hasil sebaran kuisioner mengenai ketersediaan dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan menghasilkan nilai rata-rata 1,60. Dari nilai rata-rata dapat menunjukkan pada kategori Tidak Terimplementasi pada skala 1,00-1,66. Hal ini sama dengan hasil observasi penulis di lapangan dikarenakan dana yang telah direncanakan untuk pengaspalan jalan menuju Rimbo Rawang dialihkan ke Sungai Soriak.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan dana yang dialokasikan untuk pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan sangat terbatas karena dana desa banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur di lingkungan pemukiman penduduk. Untuk melaksanakan pembangunan terkait fasilitas penunjang kegiatan pembangunan desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan tidak bisa mengandalkan dari dan desa harus adanya dukungan langsung oleh pemerintah Kabupaten.

Dari tiga tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang indikator Sumber Daya terlihat bahwa rata rata tanggapan responden berada pada kategori Belum terimplementasi, untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden

terhadap pertanyaan pada indikator Sumber Daya dapat dilihat pada tabel 5.23 sebagai berikut:

Tabel 5.23 Rekapitulasi Indikator Sumber Daya

No	Indikator Sumber Daya	Kategori			Jumlah	Rata - Rata
		T	CT	TT		
1	Kemampuan aparatur desa dalam sosialisasi pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan	4	9	7	20	1,90
2	Tingkat pendidikan aparatur desa dalam pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan	3	5	12	20	1,60
3	Ketersediaan dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan	2	7	11	20	1,60
Jumlah		9	21	30	60	1.70
Jumlah Responden		3	7	10	20	
Persentase (%)		15	35	50	100	

Sumber: Data olahan, 2020

Dari tabel 5.23 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang indikator Sumber Daya adalah pada kategori Terimplementasi sebanyak 3 orang (15%) responden, kategori Cukup Terimplementasi sebanyak 7 orang (35%) responden, kategori Tidak Terimplementasi sebanyak 10 orang (50%) responden, Maka secara rata-rata adalah 1,70. Jika rata-rata hasil penelitian terhadap seluruh Indikator Sumber Daya berada pada rentang 1,67 – 2,33. Dapat disimpulkan bahwa Indikator Sumber Daya adalah Belum Terimplementasi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan terkait Indikator Sumber Daya tentang Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan memang tidak terimplementasi karena kemampuan Aparatur Desa dalam mensosialisasikan pembangunan Kawasan Agropolitan sudah baik namun

memakan waktu yang lama dalam mensosialisasikan program tersebut. Tingkat pendidikan yang dalam struktur organisasi kawasan Agropolitan hanya Sekolah Menengah meskipun begitu tingkat pendidikan tidak dapat menjadi tolak ukur dari kemampuan seseorang, pengalaman dilapangan juga diperlukan dalam pembangunan Kawasan Agropolitan . Saat ini program pembangunan Desa Seberang Taluk menjadi Kawasan Agropolitan hanya mengandalkan dana dari desa diperlukannya dukungan dana dari pemerintah kabupaten, pemerintah pusat bahkan dari kementerian terkait. Inilah yang menjadi kendala dari tertundanya Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

5.2.6 Indikator Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan public. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam tidak terjadi bias.

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sikap dari pelaksana kebijakan kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai dan isentif.

Berikut tanggapan responden terhadap pernyataan dan pertanyaan tentang implemetasi pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.24 Tanggapan responden terhadap karakter pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
	Terimplementasi	3	5	15	25
	Cukup Terimplementasi	2	1	2	5
	Tidak Terimplementasi	1	14	14	70
Jumlah			20	31	100
Rata - Rata			1,60		

Sumber: Data olahan, 2020

Dari tabel 5.24 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Terimplementasi sebanyak 5 responden (25%), menjawab Cukup Terimplementasi sebanyak 1 responden (5%), menjawab Tidak Terimplementasi sebanyak 14 responden (70%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata -rata = 1,60. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Sejauhmana Efek Dari Program termasuk pada kategori Tidak Terimplementasi yang berada pada skala 1,00–1,66.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan dengan kepala desa, sekretaris desa, dan BPD, adapun pertanyaannya bagaimana karakter pelaksanaan Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kuswanto Kepala Desa, Yuriko Ariando sekretaris Desa, dan Yus'adi Ketua BPD.

Skalanya cukup luas, perlu pembangunan yang berkelanjutan mengenai pembangunan Agropolitan ini. (Kuswanto, Kepala Desa Seberang Taluk Wawancara langsung 3 Januari 2020_14.27WIB Kantor Kepala Desa).

Karakter pelaksanaan pembangunan desa Seberang Taluk menjadi kawasan Agropolitan diperlukan konsistensi dan perjuangan tanpa henti agar program pembangunan menjadi kawasan Agropolitan tetap berjalan. (Yus'adi, Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 4 Januari 2020_20.30 WIB dikediaman Yus'adi).

Pembangunannya masih belum sebanding dengan perencanaan pada tahap awal diperlukan serta harus diperlukan pembangunan tahap selanjutnya. (Yuriko Ariando, Sekretaris Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 3 Januari 2020_16.09 WIB Kantor Desa).

Dari hasil wawancara tentang karakter pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan masih belum sebanding dengan perencanaan pada tahap awal. Pembangunan desa menjadi Kawasan Agropolitan diperlukan perjuangan yang tiada henti untuk menjalankan program-program yang telah di buat dalam perencanaan. Program ini perlu pembangunan yang berkelanjutan ketahap berikutnya agar terlihat kemana arah karakter pelaksanaan Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan.

Dari hasil kuisioner mengenai karakter pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk menjadi kawasan Agropolitan didapatkan nilai rata-rata 1,60. Dari nilai rata-rata dapat menunjukkan kategori tidak terimplementasi.

Hal ini bersamaan dengan hasil observasi penulis lapangan diperlukan pembangunan tahap selanjutnya agar program pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan agar tetap berjalan sesuai dengan program-program yang telah di buat dalam perencanaan. Untuk merubah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan masyarakat dari yang bersifat tradisional ini memerlukan persiapan yang matang baik fisik maupun non fisik secara bertahap dan memerlukan waktu jangka panjang.

Pembangunan desa Seberang Taluk memang sudah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi beserta pemerintah Provinsi bahkan pemerintah pusat. Untuk mewujudkan program Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan tidak cukup dukungan Administrasi saja tentu harus adanya komitmen yang jelas mengenai dana yang diperlukan melaksanakan kegiatan.

Tabel 5.25 Tanggapan responden terhadap tingkat komitmen dan kejujuran pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
	Terimplementasi	3	5	15	25
	Cukup Terimplementasi	2	2	4	10
	Tidak Terimplementasi	1	13	13	65
Jumlah			20	32	100
Rata – Rata			1,60		

Sumber, Data olahan, 2020

Dari tabel 5.25 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Terimplementasi sebanyak 5 responden (25%), menjawab Cukup Terimplementasi sebanyak 2 responden (10%), menjawab Tidak Terimplementasi sebanyak 13 responden (65%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata -rata = 1,60. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Sejauhmana Efek Dari Program termasuk pada kategori Tidak Terimplementasi yang berada pada skala 1,00–1,66.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan dengan kepala desa, sekretaris desa, dan BPD, adapun pertanyaannya bagaimana tingkat komitmen dan kejujuran pelaksanaan Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kuswanto Kepala Desa, Yuriko Ariando sekretaris Desa, dan Yus'adi Ketua BPD.

Kami selalu berkomitmen penuh dan melaksnakan dengan penuh kejujuran untuk membangun Desa seberang Taluk, namun untuk semstara program ini tidak terlaksana dikarena pengaspalan yang dialihkan.(Kuswanto, Kepala Desa Seberang Taluk Wawancara langsung 3 Januari 2020_14.31 WIB Kantor Kepala Desa).

Mengenai tingkat komitmen dan kejujuran pelaksanaan pembangunan desa Seberang Taluk menjadi kawasan Agropolitan untuk melaksanakan program ini perlu adanya komitmen yang jelas antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten Kuantan Singingi, kendala yang dihadapi untuk melaksanakan program ini dimana anggaran yang direncanakan untuk membangun infrastruktur pengaspalan jalan Rimbo Rawang namun dialihkan oleh pemerintah kabupaten Kuantan Singingi untuk membangun jalan Sungai Soria. (Yus'adi, Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 4 Januari 2020_20.33 WIB dikediaman Yus'adi).

Komitmen pembangunan ini cukup baik namun pemerintah mengalihkan yang semulanya jalan Rimbo Rawang menuju akses Agropolitan akan diaspal rupanya dialihkan ke Sungai Soriak. (Yuriko Ariando, Sekretaris Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 3 Januari 2020_16.11 WIB Kantor Desa).

Dari hasil wawancara mengenai tingkat komitmen dan kejujuran dalam pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan cukup baik. Namun untuk pembangunan tahap awal pemerintah mengalihkan yang semula pengaspalan jalan pada perencanaan di Rimbo Rawang jalan yang menuju kawasan Agropolitan. Kenyataanya jalan Sungai Soriaklah yang diaspal.

Dari hasil sebaran kuisioner berdasarkan mengenai tingkat komitmen dan kejujuran dalam pelaksanaan pembangunan Desa Sebernag Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan mendapatkan nilai rata-rata 1,60. Dari nilai rata-rata dapat menunjukkan pada kategori tidak terimplementasi yang berada pada skala 1,00-1,66.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan memang pembangunan Desa Seberang taluk menjadi Kawasan agropolitan memang belum

terimplementasi untuk tahap awal seperti pengalihan aspal jalan yang semula direncanakan di Rimbo Rawang menuju kawasan Agropolitan dialihkan ke jalan Sungai Soriak. Dari sini data kita lihat tidak komitmen pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan untuk kedepannya diharapkan kepala desa yang terpilih melanjutkan program Kawasan Agropolitan ini dan terlaksana pada pemerintahan 2020-2026.

Tabel 5.26 Tanggapan responden terhadap tingkat demokratis pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
	Terimplementasi	3	3	9	15
	Cukup Terimplementasi	2	5	10	25
	Tidak Terimplementasi	1	12	12	60
Jumlah			20	31	100
Rata - Rata			1,60		

Sumber: Data olahan, 2020

Dari tabel 5.26 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Terimplementasi sebanyak 3 responden (15%), menjawab Cukup Terimplementasi sebanyak 5 responden (25%), menjawab Tidak Terimplementasi sebanyak 12 responden (60%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata -rata = 1,60. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Sejauhmana Efek Dari Program termasuk pada kategori Tidak Terimplementasi yang berada pada skala 1,00–1,66.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan dengan kepala desa, sekretaris desa, dan BPD, adapun pertanyaannya bagaimana tingkat demokratis dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kuswanto Kepala Desa, Yuriko Ariando sekretaris Desa, dan Yus'adi Ketua BPD.

Pembangunan ini bukan hanya kami yang menentukan, kami melakukan rapat dengan masyarakat untuk mengambil keputusan, namun gagal dilaksanakan karena pengaspalan jalan yang dipindahkan. (Kuswanto, Kepala Desa Seberang Taluk Wawancara langsung 3 Januari 2020_14.33 WIB Kantor Kepala Desa).

Untuk menentukann tingkat demokratis dalam pelaksanaan pembangunan desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan tidak dapat dinilai karena pembangunan ini tidak dapat melaksanakan dilanjutkan ataupun batal. (Yus'adi, Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 4 Januari 2020_20.40 WIB dikediaman Yus'adi).

Demokratis pembangunan Agropolitan ini perlu di tingkatkan dikarenakan saat ini pembangunan Agropolitan akan tertunda ataupun batal karena pengalihan aspal jalan Rimbo Rawang ke Sungai Soriak (Yuriko Ariando, Sekretaris Desa Seberang Taluk Wawancara Langsung 3 Januari 2020_16.16 WIB Kantor Desa).

Dari hasil wawancara mengenai tingkat demokratis dalam pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan perlu ditingkatkan lagi. Suatu kebijakan dinilai baik dalam segi konten namun lemah dalam segi pelaksanaan.

Berdasarkan hasil sebaran kuisioner mengenai tingkat demokratis dalam pembangunan desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan mendapatkan nilai rata-rata 1,60. Nilai rata-rata menunjukkan pada katigori tidak terimpelemntai berada pada skala 1,00-1,66.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan tingkat demokrasi pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan dalam menentukan pembanguna telah melalui musyawarah dengan masyarakat untuk menjadikan desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan. Proses kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa mulai dar perencanaan, pembentukan struktur, organisasi, mensosialisasikan telah dilaksanakan secara

demokratis. Program pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan sangatlah baik-baik terhadap kemajuan Desa maupun untuk masyarakat. Karena melalui program Kawasan Agropolitan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat disamping itu akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Tabel 5.27 Rekapitulasi Indikator Disposisi

No	Indikator Disposisi	Kategori			Jumlah	Rata - Rata
		T	CT	TT		
1	Karakter pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan	5	1	14	20	1,60
2	Tingkat komitmen dan kejujuran pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan	5	2	13	20	1,60
3	Tingkat demokratis pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan	3	5	12	20	1,60
Jumlah		13	8	39	60	1,60
Jumlah Responden		4	3	13	20	
Persentase (%)		22	13	65	100	

Sumber: Data olahan, 2020

Dari tabel 5.27 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang indikator Disposisi adalah pada kategori Terimplementasi sebanyak 4 orang (22%) responden, kategori Cukup Terimplementasi sebanyak 3 orang (13%) responden, kategori Tidak Terimplementasi sebanyak 13 orang (65%) responden, Maka secara rata-rata adalah 1,60. Jika rata-rata hasil penelitian terhadap seluruh Indikator Disposisi berada pada rentang 1,00 – 1,66. Dapat disimpulkan bahwa Indikator Disposisi adalah Tidak Terimplementasi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan terkait indikator Disposisi tentang Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan tidak terimplementasi karena karakter pembangunan kawasan Agropolitan memiliki skala yang sangat luas diperlukannya pembangunan yang berkelanjutan. Namun pembangunan Kawasan Agropolitan belum sebanding dengan perencanaan. Komitmen pelaksanaan pembangunan desa Seberang Taluk menjadi Kawasan Agropolitan telah berkomitmen penuh namun kendalanya saat ini yang terjadi adalah peralihan pengaspalan yang seharusnya jalan di Rimbo Rawang akses menuju Kawasan Agropolitan diaspal dialihkan ke jalan Sungai Soriak sedangkan Jalan Rimbo Rawang merupakan akses menuju Kawasan Agropolitan sebagai urat nadi dari mata pencarian masyarakat sehingga terjadi tidak komitmennya pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan.

5.2.7 Rekapitulasi keseluruhan indikator yang digunakan dalam penelitian

Berikut rekapitulasi dapat dilihat pada tabel 5.19 di bawah ini :

Tabel 5.28 : Rekapitulasi tanggapan responden Implementasi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

	Indikator	Kategori			Jumlah	Rata-Rata
		T	CT	TT		
1.	Organisasi	1	10	9	20	1,63
2.	Interpretasi	1	11	8	20	1,70
3.	Aplikasi	1	10	9	20	1,60
4.	Komunikasi	2	8	10	20	1,63
5.	Sumber Daya	3	7	10	20	1,70
6.	Disposisi	4	3	13	20	1,60
Jumlah		12	49	59	120	1,64
Jumlah Responden		2	8	10	20	
Persentase (%)		10	41	49	100	

Dari tabel 5.28 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang indikator pada penelitian ini adalah pada kategori Terimplementasi sebanyak 2 orang (10%) responden, kategori Cukup Terimplementasi sebanyak 8 orang (41%) responden, kategori Tidak Terimplementasi sebanyak 10 orang (49%) responden, Maka secara rata-rata adalah 1,64. Jika rata-rata hasil penelitian terhadap seluruh indikator penelitian ini berada pada rentang 1,00-1,66. Jika rata-rata hasil penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada rentang 1,00-1,66 dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pembangunan Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan Menjadi Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tidak Terimplemetasi.

Dari ke enam indikator terkait dalam Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan Organisasi, Interpretasi, Aplikasi, Komunikasi,

Sumber daya dan Disposisi dapat dilihat tidak ada indikator yang terimplementasi. Indikator Interpretasi dan Sumber Daya dikategorikan Cukup Terimplementasi. Kedua indikator ini sudah berjalan namun belum berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya.

5.3 Analisis Penelitian

Analisis penelitian merupakan pengumpulan data yang dilakukan peneliti berdasarkan indikator dan pertanyaan dari hasil sebaran kuisioner dan wawancara yaitu :

Berdasarkan analisis diatas dari hasil sebaran kuisioner didapat dinilai rata-rata hasil penelitian yaitu 1,64 yang berada pada interval tidak terimplementasi. Jika rata-rata hasil penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada rentang 1,00-1,66 berarti Tidak Terimplementasi. Hal ini dikarenakan 6 indikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu organisasi, interpretasi, aplikasi, komunikasi, sumber daya dan disposisi, hanya indikator interpretasi dan sumber daya yang cukup terimplementasi, sisanya indikator organisasi, aplikasi, komunikasi, dan disposisi seluruhnya tidak terimplementasi.

Indikator Organisasi dalam Pembangunan Kawasan Agropolitan tidak terlaksana dengan efektif dan efisien, terlihat dari pembentukan struktur yang belum sesuai dengan kebutuhan sehingga struktur pembangunan Kawasan Agropolitan tidak tertata dengan baik baik dari seginperencanaan, pelaksanaan serta tanggung jawab. Kewenangan yang masih dipegang oleh Kepala Desa dikarenakan struktur organisasi yang belum mengerti tentang Kawasan

Agropolitan. Tingkat pendidikan yang masih rendah dalam struktur organisasi inilah yang menyebabkan belum terimplementasi indikator organisasi.

Indikator Interpretasi tentang Pembangunan Kawasan Agropolitan memang belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan dikarenakan pembangunan Kawasan Agropolitan memiliki skala yang besar saat ini pembangunan kawasan Agropolitan belum sebanding dengan perencanaan. Pembagian tugas dalam struktur organisasi harus jelas sehingga tidak adanya tumpang tindih tugas serta diperlukannya panduan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kawasan Agropolitan. Tidak komitmennya pembangunan yang semulanya di rencanakan pengaspalan jalan Rimbo Rawang akses menuju Kawasan Agropolitan dialihkan kejalan Sungai Soriak sedangkan jalan tersebut merupakan perbatasan antara Desa Seberang Taluk dan Desa Seberang Taluk Hilir sehingga harus diusulkan oleh kedua Kepala Desa.

Indikator Aplikasi cukup terimplementasi. Banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk tahap awal pembangunan Agropolitan seperti infrastruktur dan fasilitas lainnya. Penerapan pembangunan yang tahap awal adalah pembukaan jalan untuk akses ke Kawasan Agropolitan malah dialihkan. Sehingga pencapaian Pembangunan Kawasan Agropolitan belum begitu terlihat bahkan bisa dikatakan belum ada. Sulitnya meyakinkan msyarakat terkait Pembangunan Kawasan Agropolitan karena pembangunan tersebut dampaknya baru akan terasa jangka panjang sementara masyarakat berkeinginan secara *instan*.

Indikator dari Komunikasi sudah efektif namun masih adanya kekurangan yang terdapat dilapangan. Kurang mengertinya masyarakat khususnya petani akan

pembangunan Kawasan Agropolitan karena paratur belum bisa merangkul masyarakat secara keseluruhan dan metode yang digunakan dalam mensosialisasikan pembangunan Kawasan Agropolitan menggunakan cara-cara tradisional. Hubungan masyarakat dengan aparatur desa maupun struktur organisasi tidak intens sehingga masyarakat belum paham dengan manfaat dan tujuan tentang pembangunan Kawasan Agropolitan tersebut.

Indikator Sumber Daya sebenarnya sudah dilaksanakan namun capaian pelaksanaannya belum baik, hal itulah Sumber Daya dikategorikan belum terimplementasi. Diperlukan waktu yang lama bagi aparatur Desa untuk mensosialisasikan Pembangunan kawasan Agropolitan dan tingkat pendidikan yang terdapat dalam struktur organisasi hanya sekolah menengah sehingga masih diperlukan pelatihan, diklat serta panduan dari Kepala Desa untuk melaksanakan Pembangunan Kawasan Agropolitan. Sumber dana yang hanya berasal dari dana desa sangat menjadi kendala dalam pembangunan diperlukannya dukungan dana dari pemerintah kabupaten, pusat bahkan kementerian.

Indikator Disposisi tidak terimplementasi dikarenakan pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Tidak sebandingnya antara perencanaan dan dengan pelaksanaan di lapangan. Untuk tahap awal terlihat tidak komitmennya pembangunan Kawasan Agropolitan dikarenakan terjadinya peralihan pengaspalan yang seharusnya di Rimbo Rawang akses jalan menuju kawasan Agropolitan dialihkan ke jalan Sungai Soriak sedangkan Jalan Rimbo Rawang merupakan urat nadi dari mata pencarian masyarakat Desa Seberang Taluk. Dengan demikian tingkat demokratis dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan

Agropolitan tidak dapat dinilai karena tidak dapat melanjutkan pembangunan kawasan Agropolitan. Hal ini yang menyebabkan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kuantan Tengah dibatalkan.

Rencana pembangunan Jalan Rimbo Rawang yang merupakan aset utama ke lokasi kawasan Agropolitan yang telah diusulkan oleh pemerintah desa Kepada pemerintah Kabupaten untuk Anggaran APBD 2019 tidak terealisasi, maka pemerintah Desa Seberang Taluk dan BPD melalui musyawarah bahwa program pembangunan kawasan Agropolitan di batalkan ini dikarenakan Pembangunan Jalan yaitu pengaspalan jalan yang dipindahkan ke lokasi Sungai Soriak. Sesuai dengan penjelasan dari pegawai dari kantor Bappedalitbang yang kami konfirmasi menjelaskan bahwa pembangunan Jalan di Soriak sudah sesuai dengan perencanaan anggaran dan lokasi yang telah disahkan oleh DPR. Pengerjaan dilapangan pun sudah sesuai dengan alamat yang tertulis di penganggaran. Jadi bukan prioritas untuk tahun 2019 Pembangunan jalan Rimbo Rawang akses menuju Kawasan Agropolitan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tidak Terimplementasi. disebabkan peralihan aspal jalan dari Rimbo Rawang akses menuju kawasan Agropolitan dialihkan ke Jalan Sungai Soriak sehingga Pembangunan tahap awal Kawasan Agropolitan batal.

6.2 Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Diperlukan analisa SWOT yang terpadu dan komitmen yang penuh dari semua pihak yang terlibat untuk bekerjasama secara terkoordinasi, terarah dan berkelanjutan agar tujuan program pembangunan desa Seberang Taluk menjadi kawasan Agropolitan bisa tercapai.
2. Peran Pemerintah desa Seberang Taluk pada kawasan Agropolitan lebih dimanfaatkan untuk turut aktif sebagai fasilitator dan mediator antara petani dan pemerintah. Hal ini memungkinkan untuk memudahkan komunikasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan petani sebagai pelakunya sehingga hubungan masyarakat dengan pemerintah lebih intens.
3. Kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan mendukung program pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan

untuk meningkatkan kemandirian masyarakat serta membangun sarana dan prasarana pendukung agar pengembangan Agropolitan berjalan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat.

4. Perlu adanya dukungan positif dari masyarakat dan diharapkan masyarakat terlibat langsung dalam pengembangan kawasan Agropolitan agar pelaksanaannya dapat berjalan baik dan terpadu karena masyarakat merupakan aktor penting dalam pembangunan ini.
5. Peningkatan sosialisasi dari pihak pemerintah Desa Seberang Taluk Maupun dari Organisasi juga sangat diperlukan dan dibutuhkan supaya masyarakat Desa Seberang Taluk mengetahui dan ikut serta dalam, menjalankan serta dapat mengontrol dan bisa menjadikan bahan pertimbangan di lapangan.
6. Perlu adanya pelatihan, pemberian motivasi dan melakukan komunikasi yang baik serta memberikan pengarahan melalui kegiatan rapat untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia sehingga mampu melaksanakan Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan.
7. Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan agropolitan harus menjadi rujukan bagi pemerintah desa untuk mengembangkan kawasan Agropolitan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Afifuddin. (2015). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino. (2019). Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn. <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, 139.
- Akib.Haedar dan Antonius Tarigan. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebinakan. Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Baca*, 117.
- Ali, F. (2013). *Teori dan Konsep Administrasi*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Anggara, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan*. Bandung : ALFABETA.
- Anggara, S. (2016). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bintoro Tjokroamidjojo. (1990). *Pengantar Administrasi pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Edward III, George C. (1990). *Public Policy Implementing*. London-England: Jai Press Ins.
- Ernan Rustiadi dan Sugimin Pranoto. (2007). *Agropolitan Membangun Ekonomi Perdesaan*. Crestpent.
- HAW,Widjaja. (2010). *Otonomi Desa*. Depok: Rajawali Pers.
- Imam Gunawan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Inu Kencana Syafii. (2010). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Mazmanian, Daniel A Paul A. Sabatier. (1983). *Implementation dan Public Policy, Scott Foresman dan Company*. USA.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Cetalan Pertama.
- Pasolong, H. (2016). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto dan Sulistyastuti. (1991). *Analisis dan Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Ripley, Randal B and Grace A. Franklin. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition*,. Chicago-Illionis: Doersey Press.
- S. Prajudi Atmosudirdjo. (1982). *Administrasi dan Manajemen Umum*. Ghalia Indonesia.
- S.P Siagian. (2014). *Filsafat Administrasi* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Sahya Anggara dan Ii Sumantri . (2016). *Administrasi Pembangunan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2007). *Metodel Administrasi*. Bandung: Alfabetta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALFABETA.
- Sumantri, I. (2016). *Administrasi Pembangunan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Taufiqurokhman. (2009). *Mengenal Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta.
- Wahyudi Kumorotomo. (2014). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

2. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun Penataan Desa
3. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman
5. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.274/VIII/2016 tentang Penetapan Kawasan Agropolitan Dan Perwilayahan Komoditi Sektor Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi

3. Internet

- Wikipedia. (2019, Juli 16). Administrasi Publik . p. 1.

DAFTAR WAWANCARA

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DESA SEBERANG TALUK MENJADI KAWASAN AGROPOLITAN DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

A. Identitas Diri

Nama : MONICA VIVILANDA
NIM : 160411071
Jurusan : Administrasi Negara

B. Identitas Informan

Nama :
 Usia :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Nama Desa : Seberang Taluk

C. Petunjuk Kegiatan

1. Daftar pertanyaan ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun
2. Jawablah pertanyaan dengan benar dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan
3. Identitas Bapak/Ibu dijamin kerahasiaannya
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

A. Organisasi

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu pembentukan struktur organisasi pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan?

.....

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu kewenangan organisasi pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan?

.....

3. Menurut Bapak/Ibu Apakah Organisasi yang ada bisa melaksanakan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan?

.....

B. Interpretasi

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu kejelasan tugas struktur organisasi dalam pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan ?

.....

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu konsistensi pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk menjadi Kawasan Agropolitan?

.....

.....

.....

.....

.....

3. Bagaimana menurut Bapak /Ibu skala prioritas dan komitmen pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan?

.....

.....

.....

.....

.....

C. Aplikasi

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu penerapan Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan?

.....

.....

.....

.....

.....

2. Menurut Bapak/Ibu sudah sejauh mana pencapaian pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan?

.....

.....

.....

.....

3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu penilaian tahap demi tahap pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan?

.....

D. Komunikasi

1. Apakah Bapak/Ibuk pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan?

.....

2. Metode apakah yang digunakan Bapak/Ibu dalam sosialisasi pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan?

.....

3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana intensitas komunikasi aparaturnya pemerintah desa dengan masyarakat (petani)?

.....

E. Sumber Daya

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kemampuan birokrat dalam melakukan sosialisasi kebijakan pembanguna Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan?

.....

2. Menurut Bapak?/Ibu apakah tingkat pendidikan struktur organisasi diperlukan dalam pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan?

.....

F. Disposisi

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu karakter pelaksanaan kebijakan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan ?

.....

2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tingkat komitmen dan kejujuran pelaksanaan pembangunan desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan?

.....

.....
.....
.....

3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tingkat demokratis pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan?

.....

.....

.....

.....

.....

DAFTAR KUISIONER

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DESA SEBERANG TALUK MENJADI KAWASAN AGROPOLITAN DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

D. Identitas Diri

Nama : MONICA VIVILANDA

NIM : 160411071

Jurusan : Administrasi Negara

E. Identitas Responden

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

F. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Isilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pengalaman, pengamatan pengetahuan Bapak/Ibu mengenai Implementasi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan memberi tanda (√) pada salah satu alternative jawaban dimana penjabaran kode alternative jawaban sebagai berikut:

T : Terimplementasi

CK : Cukup Terimplementasi

KT : Kurang Terimplementasi

No	Pernyataan	Alternative Jawaban		
		T	CT	KT
1.	Bagaimana menurut Bapak/Ibu pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan			
2.	Bagaimana menurut Bapak/Ibu kewenangan organisasi dalam pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan			
3.	Bagaimana menurut Bapak/Ibu kejelasan struktur organisasi mempunyai dalam pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan			

A. Organisasi

B. Interpretasi

No	Pernyataan	Alternative Jawaban		
		T	CT	KT
1.	Bagaimana menurut Bapak/Ibu Konsistensi pelaksanaan tugas pembanguan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan			
2.	Bagaimana menurut Bapak/Ibu skala prioritas pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan			
3.	Bagaiman menurut Bapak/Ibu komitmen pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan			

C. Aplikasi

No	Pernyataan	Alternative Jawaban		
		T	CT	KT
1.	Bagaimana menurut Bapak/Ibu penerapan tugas dan fungsi dari struktur organisasi dalam Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan			
2.	Bagaimana menurut Bapak/Ibu penilaian tentang pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan			
3.	Bagaimana menurut Bapak/Ibu pencapaian pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan			

D. Komunikasi

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban		
		T	CT	KT
1.	Bagaimana menurut Bapak/Ibu sosialisasi pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan			
2.	Bagaimana menurut Bapak/Ibu metode yang digunakan dalam sosialisasi pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan			
3.	Bagaimana menurut Bapak/Ibu intensitas komunikasi aparatur desa dengan masyarakat (petani) dalam pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan			

E. Sumber Daya

No	Pernyataan	Alternative Jawaban		
		T	CT	KT
1.	Bagaimana menurut Bapak/Ibu kemampuan aparatur desa dalam sosialisasi pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan			
2.	Bagaimana menurut Bapak/Ibu tingkat pendidikan aparatur desa dalam pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan			
3.	Bagaimana menurut Bapak/Ibu ketersediaan dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan			

F. Disposisi

No	Pernyataan	Alternative Jawaban		
		T	CT	KT
1.	Bagaimana menurut Bapak/Ibu karakter pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan			
2.	Bagaimana menurut Bapak/Ibu tingkat komitmen dan kejujuran pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan			
3.	Bagaimana menurut Bapak/Ibu tingkat demokratis pelaksanaan pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan			

Wawancara Dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa



Pengisian Kuisisioner Kepada Petani





Wawancara Dengan BPD

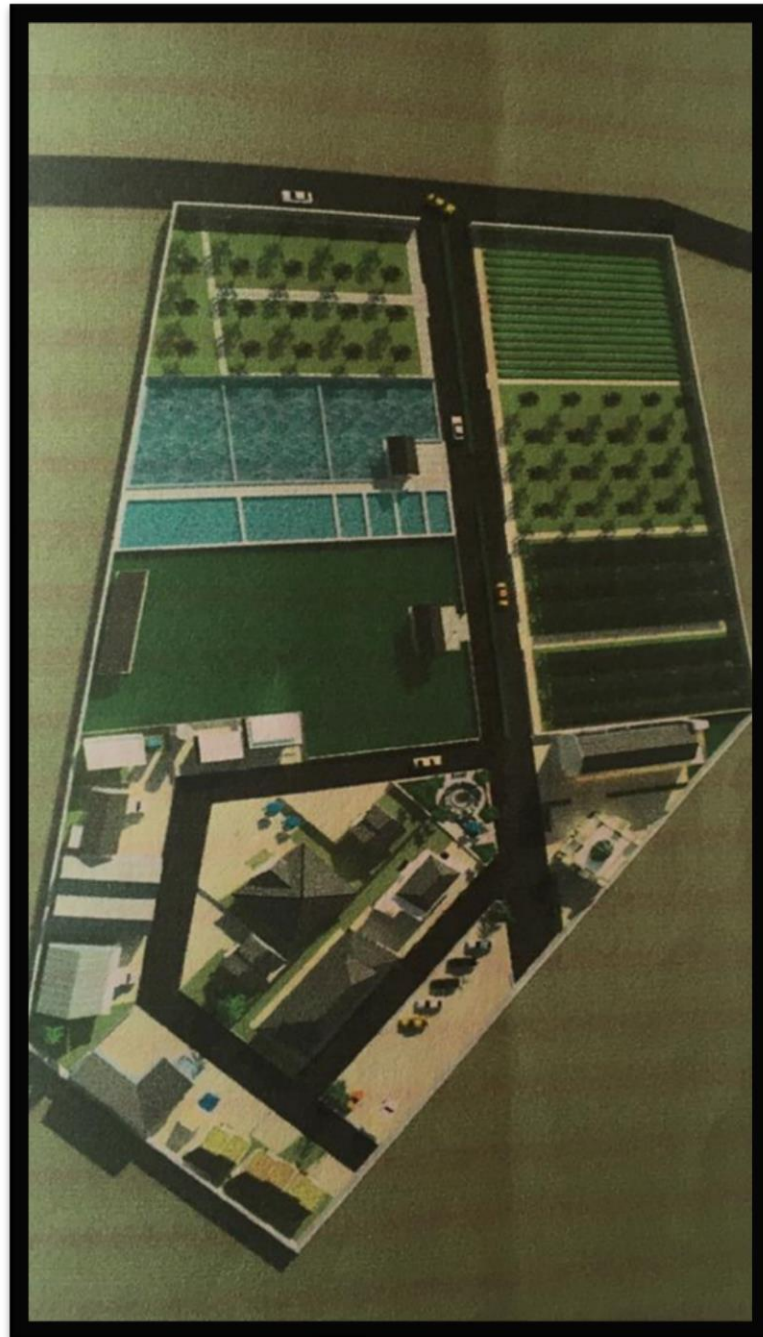


Jalan Menuju Kawasan Agropolitan



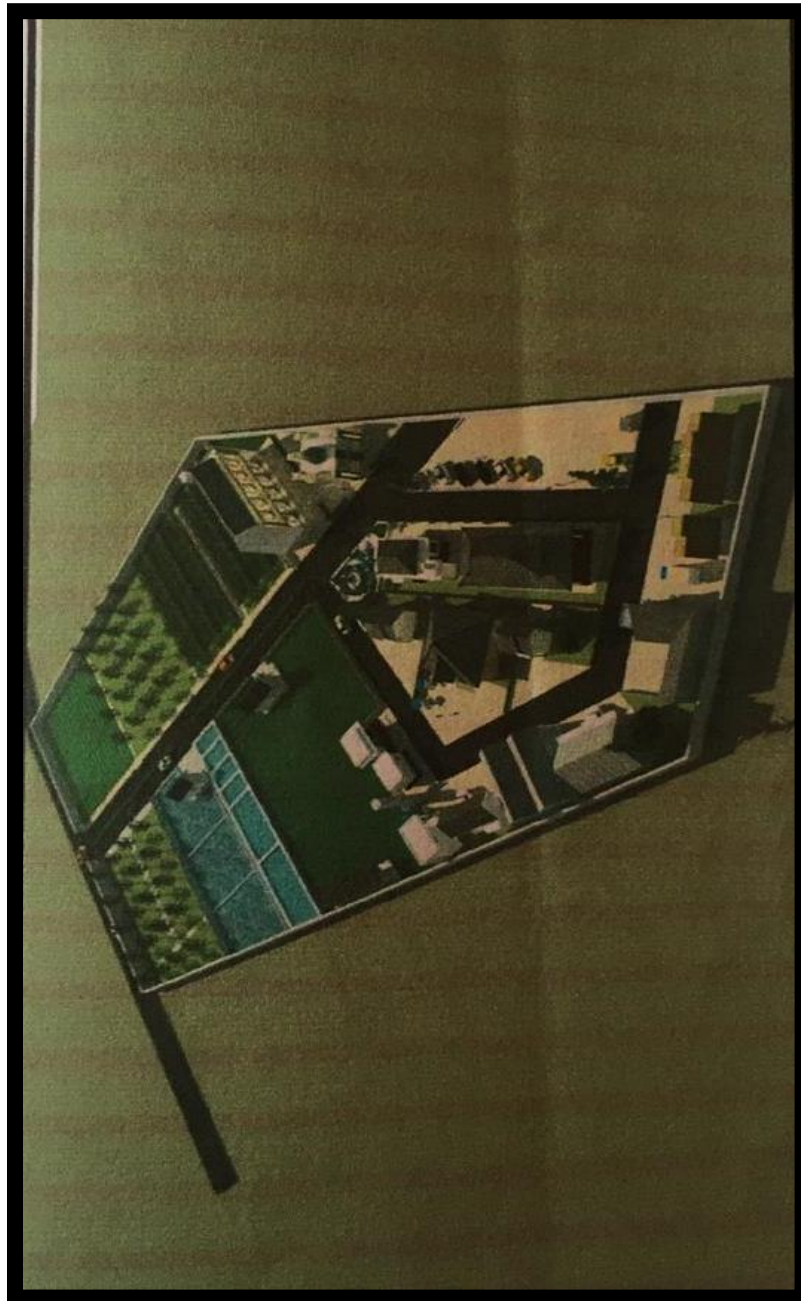
Gambar Rencana Pembangunan Kawasan Agropolitan

Tampak Belakang



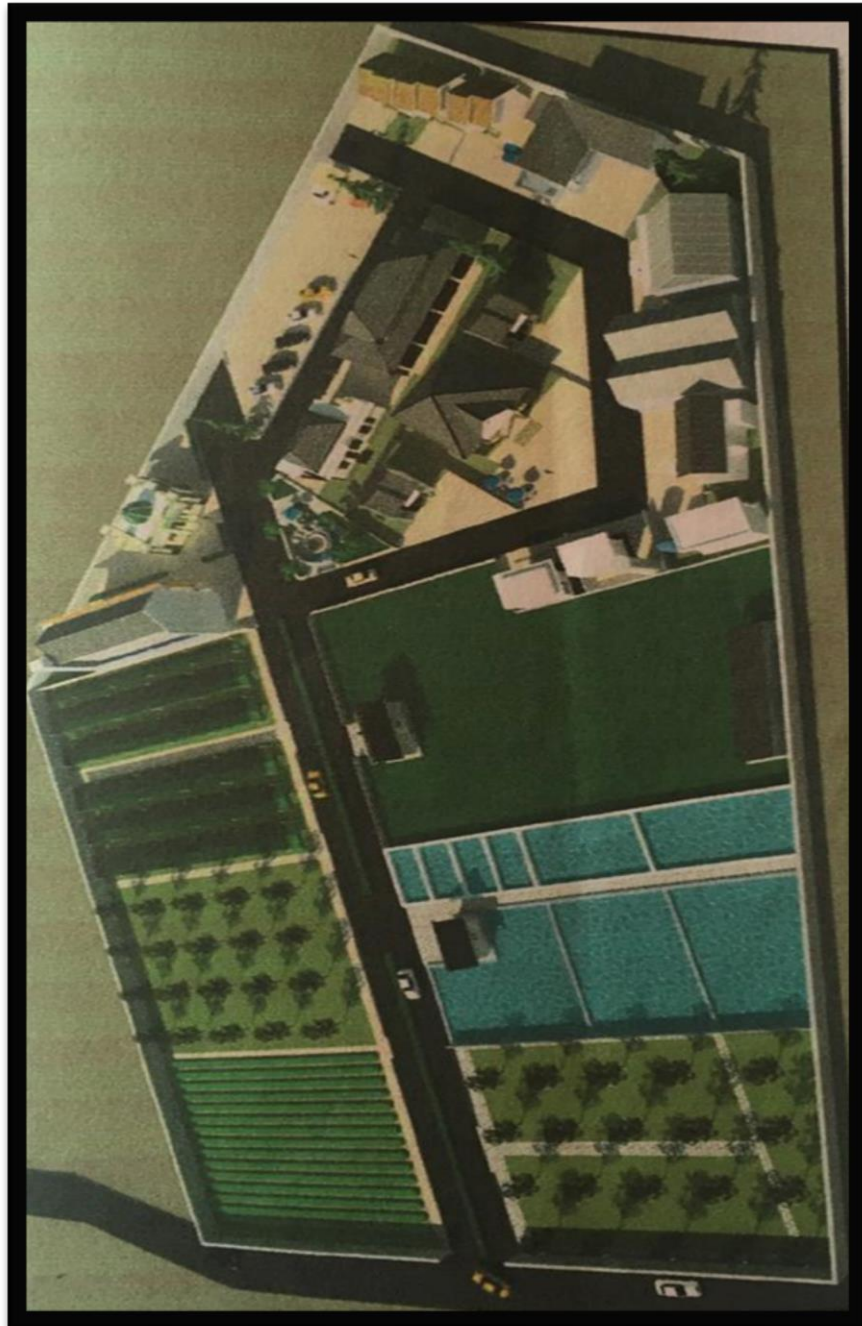
Gambar Rencana Pembangunan Kawasan Agropolitan

Tampak Kanan



Gambar Rencana Pembangunan Kawasan Agropolitan

Tampak Depan



Gambar Rencana Pembangunan Kawasan Agropolitan

Tampak Kiri

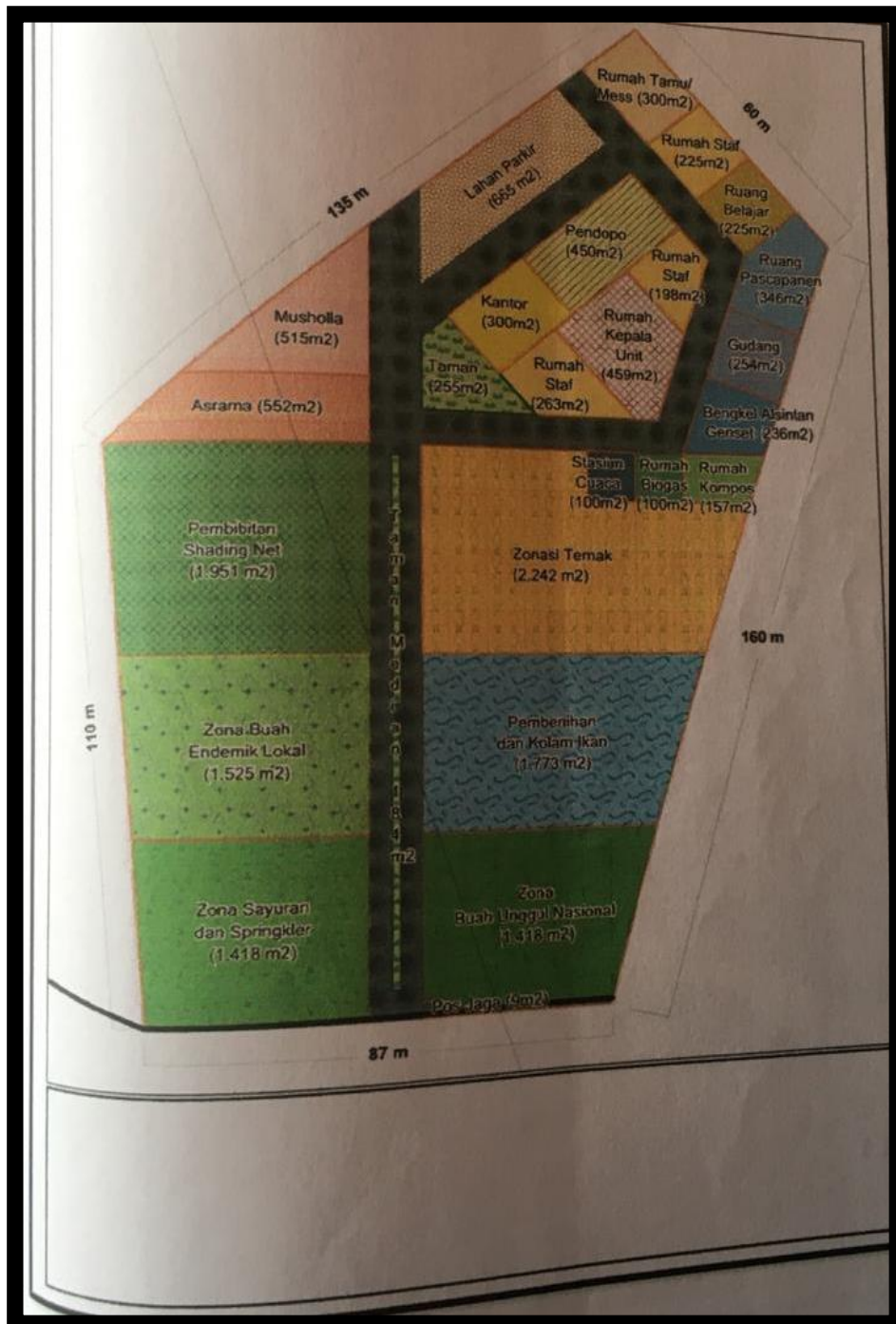


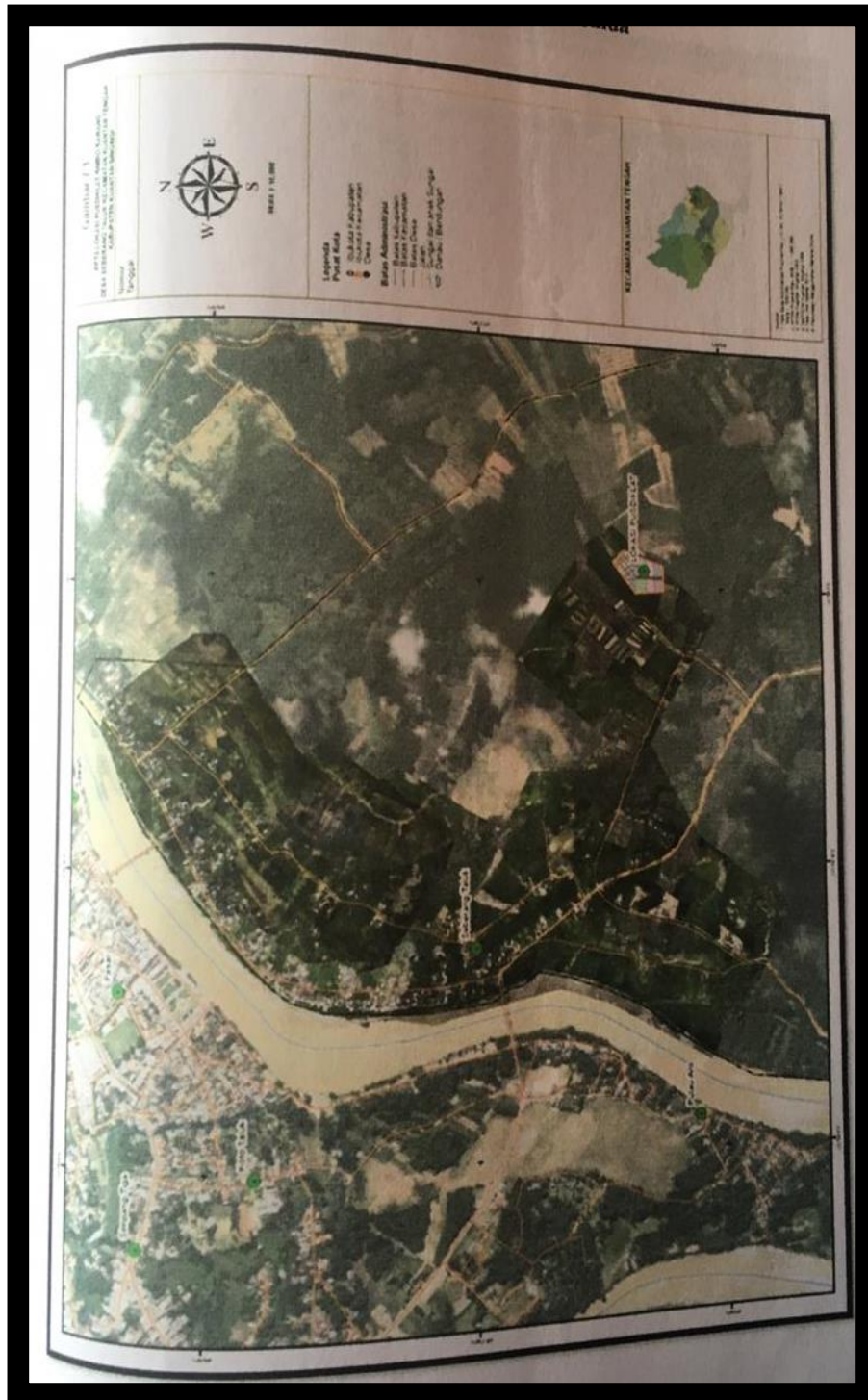
Perkiraan Biaya Pembangunan Kawasan Agropolitan Desa Seberang Taluk

Kecamatan Kuantan Tengan Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi					
No	Bangunan dan Fasilitas	Unit	Perkiraan Luas, Jumlah	Satuan	Jlh Biaya
					(Rp)
1	Kantor 1 bh Type 60	1	60	m ²	210,000,000
2	Ruang Belanja/Kas 1 bh 8 x 10 m	1	80	m ²	260,000,000
3	Pondopo 15 x 15 m	1	225	m ²	675,000,000
4	Mess Kopel 2 unit type 45 (Rumah Tamu)	2	45	m ²	315,000,000
5	Asrama 14 ruang 3 x 4 m (Peserta Pelatihan)	1	168	m ²	588,000,000
6	Rumah Ka Unit 1 bh type 45	1	45	m ²	157,500,000
7	Rumah Staf 3 bh type 36	3	36	m ²	324,000,000
8	Mushalla 6 x 6 m dan fasilitas air	1	36	m ²	126,000,000
9	Gudang 1 bh 4 x 8 m	1	48	m ²	96,000,000
10	Bengkel Asletan untuk UPJA 1 bh 6 x 8 m	2	112.5	m ²	337,500,000
11	Green House 2 unit @ 4,5 x 25 m	1	1,000	m ²	300,000,000
12	Pembibitan Shading net 1 unit 1000 m ²	1	500	m ²	150,000,000
13	Percontohan irigasi sprinkler dan tetes	1	60	m ²	180,000,000
14	Ruang paska panen dan packing 6 x 10 m (terbuka)	1	2	set	15,000,000
15	Sumur Bor 2 bh mesin pompa listrik	1	1	set	12,500,000
16	Menara air T 6 m, 4 m ²	1	2,000	m ²	600,000,000
17	Jalan lingkungan L 8 m Paving Block	1	900	m ²	270,000,000
18	Lapangan parkir 15 x 60 m (Kerikil Putih T 10 cm)	1	360	m	228,000,000
19	Pagar Keliling	1	60	m ²	180,000,000
20	Rumah Kompos 6 x 10 m	1	32	m ²	96,000,000
21	Bangunan BioGas 4 x 8 m	1	1	set	25,000,000
22	Stasiun cuaca sederhana berpagar (Ombrometer, higrometer, anemometer)	1	480	m ²	144,000,000
23	Jalan Setapak Paving Block L 0,8 m	1	1	set	125,000,000
24	Taman median jalan dan lingkungan, kursi dan lampu	1	6.25	m ²	21,875,000
25	Pos Jaga 2,5 x 2,5 m	1	1	set	25,000,000
26	Gerbang	1	70	phn	10,500,000
27	Penghijauan buah endemik lokal (Rambai, tampui, sentul, mata kucing, derendan, dll)	1	70	phn	10,500,000
28	Penanaman tanaman koleksi buah-buahan unggulan nasional	1	12	set	6,000,000
29	Tong Sampah	1	4	set	40,000,000
30	Gazebo	1	1	set	150,000,000
31	Genet Back Up dan Bangunan	1	1	set	20,000,000
32	Jaringan WIFI	1	10	btg	50,000,000
33	Tiang Listrik	1	1	set	200,000,000
34	Pembenhian dan kolam percontohan ikan	1	360	m	65,000,000
35	Drainase utama	1			4,998,125,000
TOTAL					4,998,125,000

Rancangan Pembangunan Agropolitan



[illegible]



BUPATI KUANTAN SINGINGI

ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA, KAMIS TANGGAL 03 NOPEMBER 2015

BUPATI KUANTAN SINGINGI SECARA RESMI MENCANANGKAN DIMULAINYA

"PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DAN KAWASAN WATER FRONT CITY"

DESA SEBERANG TALUK KECAMATAN KUANTAN TENGAH

SEMOGA ALLAH SWT SELALU MEMBERIKAN RAHMAT DAN KARUNIANYA

UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KAB. KUANTAN SINGINGI

Seberang Taluk, 03 Nopember 2016

BUPATI KUANTAN SINGINGI

Drs. H. MURSINI, M.Si



PROVINSI RIAU .

**KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : Kpts. 274 /VIII/2016**

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN AGROPOLITAN
DAN PERWILAYAHAN KOMODITI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan bidang pertanian yang terarah dan berkelanjutan serta terintegrasi dalam suatu kawasan pertanian terpadu, perlu dikembangkan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. bahwa untuk mendukung pengembangan Kawasan Agropolitan khususnya serta pembangunan sektor pertanian pada umumnya, perlu ditetapkan perwilayahan komoditi sektor pertanian di Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Agropolitan dan Perwilayahan Komoditi Sektor Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.14-4874 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau.
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.14-4875 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kawasan Agropolitan dan Perwilayahan Komoditi Sektor Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :

a. Kawasan yang menjadi prioritas pengembangan infrastruktur pertanian di Kabupaten Kuantan Singingi dengan lokus Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah;

b. Kawasan yang menjadi prioritas pembinaan yaitu :

- Peningkatan kesejahteraan petani/pekebun/peternak/petambak;
- Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan;
- Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan.
- Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan;
- Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan;
- Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan.

KETIGA : Perwilayahan Komoditi Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah menetapkan komoditi sektor pertanian unggulan yang dikembangkan pada suatu wilayah tertentu.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kuantan Singingi.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 8 Agustus 2016



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Riau di Pekanbaru;
3. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.

Lampiran I. Keputusan Bupati Kuantan Singingi
Nomor : Kpts. 274 /VIII/2016
Tanggal : 8 Agustus 2016

KAWASAN AGROPOLITAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

No.	Lokus Kawasan Agropolitan	Komoditi Utama	Sub Sektor
1	Desa Seberang Taluk Kec. Kuantan Tengah	Padi	Tanaman pangan
		Jagung	Tanaman pangan
		Kedele	Tanaman pangan
		Sorghum	Tanaman pangan
		Aneka sayuran	Hortikultura
		Aneka buah-buahan	Hortikultura
		Aneka tanaman hias	Hortikultura
		Kelapa sawit	Perkebunan
		Karet	Perkebunan
		Kakao	Perkebunan
		Sapi	Peternakan
		Ayam	Peternakan
		Itik	Peternakan
		Ikan patin	Perikanan
		Ikan nila	Perikanan
		Ikan gurami	Perikanan



Lampiran II Keputusan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : Kpts. 274 /VIII/2016
 Tanggal : 8 Agustus 2016

**PERWILAYAHAN KOMODITI SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

No.	Kecamatan	Luas Lahan Sawah (Ha)	Komoditi Tanaman Pangan (Lahan Sawah)	Komoditi Hortikultura (Lahan Pekarangan)
1	Cerenti	820,53	Padi	Durian
2	Inuman	567,15	Padi	Durian
3	Kuantan Hilir	216,57	Padi	Sawo
4	Kuantan Hilir Seberang	551,52	Padi	Sawo
5	Pangean	942,90	Padi	Durian
6	Logas Tanah Darat	30,00		Durian
7	Benai	774,0	Padi	Jambu
8	Sentajo Raya	257,32	Padi	Jeruk, Salak Pondoh
9	Kuantan Tengah	733,30	Padi	Jambu, Lengkeng
10	Gunung Toar	683,77	Padi	Durian, Manggis
11	Kuantan Mudik	749,52	Padi	Jambu, Durian
12	Hulu Kuantan	212,80	Padi	Durian
13	Pucuk Rantau	38,85		Durian
14	Singingi	74,21		Mangga
15	Singingi Hilir	0,0		Jeruk, Salak Pondoh
	Total	6.652,82		





YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760561655, email. Unikskuantan@gmail.com

LEMBARAN BIMBINGAN

Nama : Monica Vivilanda
NIM : 160411071
Judul : Implementasi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi
Pembimbing 1 : Desriadi, S.Sos, M.Si
Pembimbing 2 : Sahri Muharram, S.Sos, M.Si
Mulai Bimbingan :

No	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing		Paraf Mahasiswa
			1	2	
5	24/10-19	- Perencanaan - Marga - Teori		✗	
6.	29/10-2019	- Cara membuat peta dan (peta).			
7.	30/10-2019	- Peta dan peta & peta.			
		- Teknik pemetaan lapangan.			
		- Peta dan Berita also - y			
8.	1/11-2019	- Buletin dan peta - Adu yang sesuai peta			

- Peta dan
- Marga & peta



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760561655,email. Unlkskuantan@gmail.com

LEMBARAN BIMBINGAN

Nama

: Monica Vivilanda

NIM

: 160411071

Judul

: Implementasi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Pembimbing 1

: Desriadi, S.Sos,M.Si

Pembimbing 2

: Sahri Muharram, S.Sos,M.Si

Mulai Bimbingan

:

No	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing		Paraf Mahasiswa
			1	2	
1.	08/10 2019	1. Metodel 4. penulisan 2. Daftar isi 3. Kata pengantar		✓	
2	14/10 2019	1. Jenis kegiatan 2. tambahkan teori MSDM 3. ABSTRAK B. INVERSI		✓	
3		Tambahkan teori kegiatan sos,		✓	
4.	23/10-2019	- konsep & perkembangan kata pengantar Daftar isi Daftar tabel Tabel selubung - Daftar pustaka 15 pm	✓		

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760561655,email. Unikskuantan@gmail.com

LEMBARAN BIMBINGAN

Nama : Monica Vivilanda

NIM : 160411071

Judul : Implementasi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Pembimbing 1 : Desriadi, S.Sos,M.Si

Pembimbing 2 : Sahri Muharram, S.Sos,M.Si

Mulai Bimbingan :

[illegible]

No	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing		Paraf Mahasiswa
			1	2	
	27/11-27	Perencanaan bisnis dan wawancara			
	27/11-19	Refisi: Questioner dan wawancara		✓	
	3/12-19	Lampiran ke BAB V			
	25/01-20	1. Observasi 2. Dokumentasi 3. Kesimpulan		✓	
	12/2-2020	Hasil analisis & perbaikan saran & solusi dan hasil analisis	✓		
	18/2-2020	Tambahan hasil analisa & koreksi program aplikasi	✓		
	27/2-2020	Dokter hasil gambar abstrak. margin	✓		

- Ringkasan
- Dokumentasi & koreksi

[illegible]



Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KANTOR KEPALA DESA SEBERANG TALUK

Komplek Kantor Desa - Jalan Lingkar Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/SKET/SBT-I/2020/016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan bahwa :

Nama	: MONICA VIVILANDA
Tempat/Tanggal Lahir	: Teluk Kuantan, 12 juli 1997
NPM	: 16041071
Jurusan	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial

Bahwa yang bersangkutan diatas adalah benar mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) yang mana telah menyerahkan tugas mata kuliahnya tentang **"Implementasi Pembangunan Desa Seberang Taluk Menjadi Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi"** kepada Kantor Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang namanya diatas untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di: Seberang Taluk
Pada Tanggal : 10 Januari 2020



[Signature]
RUSWANTO, A.Md

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Monica Vivilanda
Tanggal Kelahiran : Taluk Kuantan, 12 Juli 1997
Alamat : Dusun Tengah RT 01 RW 01 Desa Seberang Taluk
Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan
Singingi
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Material : Belum Menikah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Email : monca.vivilanda12@gmail.com
No Hp : 0812-7593-3353

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 004 Seberang Taluk (2003-2009)
2. SMP Negeri 2 Teluk Kuantan (2009-2012)
3. SMA Negeri 1 Teluk Kuantan (2012-2015)
4. Universitas Islam Kuantan Singingi (2016-2020)

Hormat Saya,

Monica Vivilanda